



Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



MODUL PELATIHAN PENDIDIKAN INKLUSIF

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
2010**

MODUL PELATIHAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Oleh : Kementerian Pendidikan Nasional

Copyright

Penerbit

Desain Buku : M. Makinun Amin, S.Si

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit

Cetakan pertama : November 2009

Edisi Revisi : 2010

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN : 978 - 979 - 25 - 6075 - 6

PENGANTAR

Editor :

Dr. Budiyanto*

Tim Penyusun :

Dr. Budiyanto

Praptono, M.Ed

Drs. Munawir Yusuf, M.Psi

Dr. Asep Supena, M.Psi

Drs. Sujarwanto, M.Pd

Drs. Asep Ahmad S., M.Pd

Tita Rakhmita

Tim MCPM-AIBEP

Dr. Yuliati, M.Pd
(Editor Bahasa)

M. Makinun Amin, S.Si
(Lay-outer)

Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif Edisi Revisi Tahun 2010 merupakan hasil penyempurnaan *Modul Training of Trainers (ToT)* yang terbit pada tahun 2009. Modul ini dirancang khusus dalam konteks kontribusinya pada terbentuknya *Master Trainers* di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kompetensi akademis dan profesional dalam mensosialisasikan Pendidikan Inklusif.

Terbentuknya *Master Trainers* yang kompeten dan profesional dalam pendidikan inklusif bukanlah hal yang sederhana. Kompetensi itu mencakup sub-kompetensi penyampaian konsep-konsep pendidikan khusus dan kompetensi melatih keterampilan khusus, sub-kompetensi managerial, sub-kompetensi pendampingan dan pembimbingan sekolah inklusif. Kemahiran-kemahiran tersebut diperoleh melalui pelatihan-pelatihan khusus yang pelaksanaannya memerlukan buku panduan. Untuk keperluan inilah kehadiran *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif Edisi Revisi Tahun 2010* dipandang penting sebagai materi yang harus dikuasai secara kognitif dalam upaya memperoleh kemahiran *Master Trainers* yang kompeten dan profesional.

Ada dua kategori materi yang termuat dalam modul ini yang diwujudkan dalam tujuh modul. Kategori pertama landasan filosofi yang mendasari pentingnya pendidikan inklusif serta implikasinya (modul 1.2) dan kategori kedua materi-materi untuk pengembangan keterampilan khusus (modul 3, 4, 5, 6, dan modul 7). Materi kategori kedua dilengkapi dengan contoh-contoh pengembangan keterampilan khusus baik berupa instrumen, rancangan pembelajaran, rancangan media dan praktik pembuatan media, praktik penyelenggaraan layanan kompensatoris, dan pedoman monitoring. Susunan modul dirancang berdasarkan komponen-komponen (1) deskripsi topik, (2) tujuan, (3) strategi penyampaian, (4) uraian materi, (5) evaluasi, (6) tindak lanjut, dan (7) referensi. Topik-topik dalam tujuh modul tersebut dikemas dalam judul-judul berikut.

- Modul I Landasan dan Konsep Pendidikan Inklusif
- Modul II Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusif
- Modul III Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus
- Modul IV Pedoman Pengembangan Kurikulum, Silabus dan RPP
- Modul V Media Pembelajaran dan Peralatan Khusus
- Modul VI Pengembangan Layanan Kompensatoris bagi Anak Berkebutuhan Khusus
- Modul VII Monitoring dan Evaluasi Diri Sekolah Inklusif

Penggunaan Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif Edisi Revisi Tahun 2010 sebagai panduan pelatihan diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya yakni dapat melahirkan *Master Trainers* yang mampu (1) menyiapkan kegiatan pelatihan bagi guru sekolah inklusif di tingkat kabupaten/kota; (2) melaksanakan pelatihan bagi guru sekolah inklusif di tingkat Kabupaten/Kota; (3) melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran bagi ABK pada sekolah inklusif; dan (4) membuat laporan kegiatan pendidikan inklusif.

Semoga modul ini dapat dipergunakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusif, dan sebagai rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan inklusif, serta meningkatkan kompetensi *Master Trainers* di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Di samping itu mudah-mudahan uraian tersebut membantu pemakai modul ini untuk mempergunakannya secara efektif dan efisien.

Jakarta,
Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN

Upaya pengembangan dan peningkatan Pendidikan Luar Biasa telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat lebih-lebih sejak disahkannya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang di antaranya tentang penyelenggaraan *Pendidikan Inklusif*, yakni anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama-sama di satuan pendidikan reguler. Inklusif ini pada hakikatnya merupakan kebutuhan hakiki setiap manusia. Suatu kebutuhan untuk diterima sebagai bagian dari anggota masyarakat, baik dalam pergaulan sosial maupun dalam lingkungan pendidikan. Inklusif adalah jalan hidup yang sejalan dengan hak asasi setiap siswa.

Di bidang pendidikan, inklusif merupakan perubahan praktis yang bisa dilakukan oleh pembina dan pengelola proses pembelajaran, sehingga peserta didik dengan beragam latar belakang dan kemampuan bisa mencapai keberhasilan yang optimal. Perubahan ini berpengaruh pada cara pandang, sikap dan perilaku ABK yang biasanya tersisihkan diterima oleh masyarakat. Bahkan lebih dari itu, inklusif juga berpengaruh pada cara pandang siswa normal, orang tua, guru dan administrator sekolah serta anggota masyarakat yang bekerjasama dengan sekolah untuk menghargai ABK dan memberikan perlakuan yang sama. Kejadian dan pengalaman yang terjadi pada seseorang dalam suatu kelompok akan berpengaruh pada anggota yang lain dari kelompok tersebut.

Salah satu kunci keberhasilan program pendidikan inklusif adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi akademik dan profesional dalam pendidikan khusus. Dalam arti guru-guru di sekolah pendidikan inklusi memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam mengelola proses pembelajaran yang memungkinkan dapat memaksimalkan potensi setiap anak, anak dapat terlibat apapun kondisinya, dan kebutuhan khususnya terlayani.

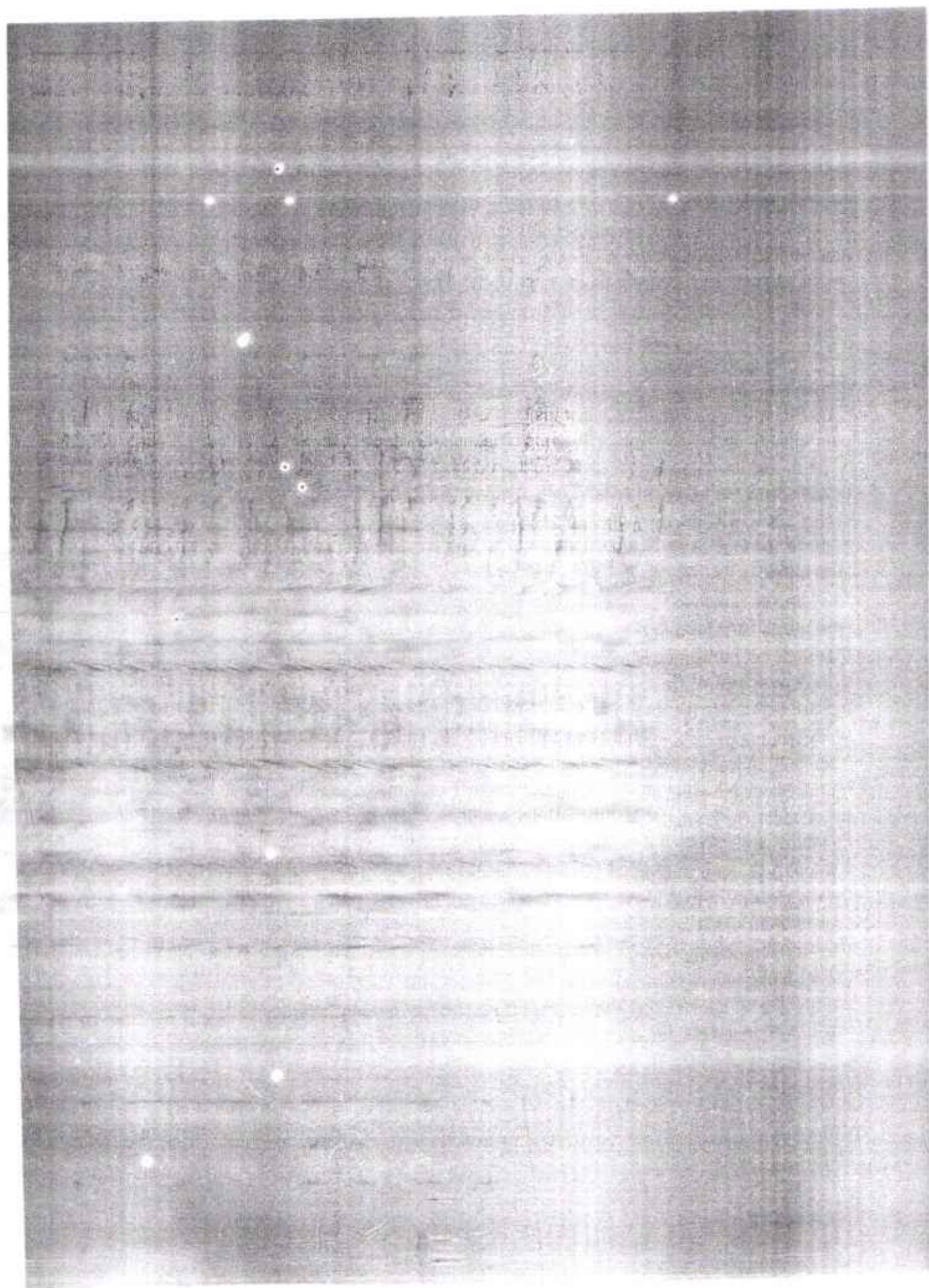
Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yang diwakili oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa didukung oleh Managing Contractor Program Management Australia Indonesia Basic Education Program (MCPM-AIBEP) telah bekerjasama menerbitkan *Modul Pelatihan Pendidik Inklusif* (Edisi Revisi) dari *Modul Training of Trainers (ToT)* (2009). Modul ini dilengkapi dengan 4 (empat) CD film mengenai pendidikan inklusif untuk digunakan sebagai pedoman pelatih dalam upaya mewujudkan *Master Trainers* yang kompeten dalam meningkatkan SDM praktis pendidikan inklusi.

Kami berharap, modul ini dapat dimanfaatkan dengan efisien dan efektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan demi peningkatan mutu dan layanan pendidikan yang semakin merata di Indonesia, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pada gilirannya '*pendidikan untuk semua*' dapat terwujud.



Direktor Pembinaan SLB

Dr. Ekojati Sukarso, drg., MM., Mkom
NIP. 19500306 197903 1 001



PENDAHULUAN

UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, namun dalam implementasinya kebijakan pendidikan di Indonesia sampai sekarang belum mampu menjangkau semua anak usia sekolah untuk mendapatkan akses pendidikan secara memadai. Data Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa tahun 2008/2009 menunjukkan bahwa jumlah ABK usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan formal baru sekitar 36%. Sisanya sekitar 64% ABK belum menikmati pendidikan. Untuk mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara khususnya ABK usia sekolah, maka pendidikan inklusif dikembangkan. Pengembangan pendidikan inklusif merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs). Paling lambat tahun 2015 semua anak usia sekolah laki-laki dan perempuan di muka bumi harus sudah mendapatkan akses pendidikan.

Di Indonesia, kebijakan dan implementasi pendidikan inklusif dapat dikelompokkan menjadi enam fase, yaitu (1) ujicoba, (2) sosialisasi, (3) penguatan institusi, (4) regulasi, (5) pembinaan dan pengembangan. Fase-fase tersebut diuraikan sebagai berikut.

Fase Ujicoba. Uji coba pendidikan terpadu menuju pendidikan inklusif telah dilaksanakan oleh Balitbangdiknas tahun 1999 - 2002 dengan sasaran 7 SD di kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis ujicoba, Balitbangdiknas merekomendasikan perlunya dikembangkan pendidikan inklusif di Indonesia.

Fase Sosialisasi. Pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Luar Biasa mengadakan sosialisasi pendidikan inklusif ke seluruh Indonesia. Sasaran sosialisasi meliputi LPTK, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru dan *Stakeholder* terkait. Pada tahun 2003 keluar UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya antara lain ditegaskan bahwa 'pendidikan khusus diberikan kepada warga negara yang berkelainan dan/atau mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa diselenggarakan secara inklusif dan/atau berupa satuan pendidikan khusus.' (penjelasan Ps. 15). Pasal tersebut menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu alternatif bentuk layanan pendidikan bagi ABK di luar bentuk SLB yang selama ini sudah berjalan. Pada tahun itu juga Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan surat edaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab./Kota agar setiap Kab./Kota menunjuk sekurang-kurangnya satu SD, satu SMP dan satu SMA sebagai sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif. Untuk memperkuat edaran Dirjen tersebut, Direktorat Pendidikan Luar Biasa mulai mengembangkan panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Fase penguatan institusi. Diawali pada tahun 2004 ditandai dengan perintisan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di tingkat SD, SMP dan SMA. Sekolah rintisan inklusif tersebut mendapatkan pelatihan penyelenggaraan pendidikan inklusif serta memperoleh subsidi langsung dari Pemerintah Pusat atau Provinsi. Subsidi tersebut, ada yang berupa pengadaan ruang kelas baru sebagai ruang sumber untuk ABK, bantuan operasional pendidikan inklusif, bantuan sarana laboratorium, bantuan sarana perpustakaan, teknologi informasi, dan beasiswa bagi ABK. Untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif, Pusat Kurikulum Balitbangdiknas juga telah melakukan kajian terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Beberapa Perguruan Tinggi dan Organisasi lokal maupun Internasional juga mulai mengambil prakarsa mengadakan berbagai kajian, pelatihan dan penelitian terkait dengan pendidikan inklusif.

Fase Regulasi. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang di dukung oleh Managing Contractor Program Management Australia Indonesia Basic Education Program (MCPM-AIBEP) menggagas konsep Permendiknas tentang Pendidikan Inklusif. Konsep Permendiknas disusun melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, diskusi, dan pertemuan yang melibatkan berbagai komponen terkait (seperti Birokrat, Organisasi, Sekolah, dan masyarakat). Finalisasi Permendiknas tentang pendidikan inklusif difasilitasi langsung oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, sampai disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkelainan dan Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa oleh Menteri Pendidikan Nasional. Berdasarkan Permendiknas tersebut maka penyelenggaraan sekolah inklusif ditata sesuai dengan ketentuan yang ada.

Fase Pembinaan dan Pengembangan. Fokus pembinaan dan pengembangan adalah perluasan akses dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan inklusif. Upaya kongkret yang dilakukan pada fase ini ditandai dengan adanya pengembangan pilot project penyelenggaraan pendidikan inklusif di dua Provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Maluku Utara, oleh Reference Group Pendidikan Inklusif Dirjen

Mendikdasmen yang didukung oleh Direktorat PSLB dan difasilitasi MCPM-AIBEP. Pada saat yang bersamaan, Direktorat Pembinaan SLB juga mengembangkan pelaksanaan pendidikan *inklusif* di berbagai sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA/SMK yang tersebar di seluruh Indonesia. Pilot project ini dikembangkan untuk menghasilkan salah satu model pendidikan inklusif yang sesuai dengan potensi daerah serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan model percontohan tersebut, maka dikembangkan perangkat panduan berupa *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Melalui modul ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi setiap daerah (baik tingkat Provinsi maupun Kab./Kota) dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif di daerahnya masing-masing.

Pembinaan dan pengembangan sekolah inklusif perlu terus menerus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait, agar semua anak usia sekolah dapat memperoleh pendidikan yang bermutu.

TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN MODUL

Disahkannya Permendiknas No. 70/2009 berimplikasi bahwa penyelenggaraan program pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi sosial kemasyarakatan serta stakeholders terkait. Program ini secara bertahap harus diarahkan menjadi bagian dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara mandiri sesuai dengan paradigma desentralisasi. Pemerintah Pusat lebih berperan sebagai fasilitator dan regulator sehingga pihak daerah (Provinsi, Kab./Kota) didorong untuk dapat lebih banyak mengambil prakarsa dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu berbasis pendidikan inklusif. Oleh sebab itu, kehadiran *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif* yang dikembangkan oleh Reference Group Pendidikan Inklusif Dirjen Mandikdasmen yang didukung oleh Direktorat PSLB dan difasilitasi MCPM-AIBEP dipandang penting. Adapun tujuan dan sasaran utama dari modul tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Provinsi/Kab./Kota dapat *memanfaatkan* modul dalam rangka menyiapkan calon Master Trainers (MT) tingkat Provinsi/Kab/Kota dalam bidang pendidikan inklusif melalui kegiatan pelatihan terstruktur, sistematis, terbimbing dan terukur. Dengan menggunakan *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*, standarisasi proses dan output pelatihan MT di setiap Provinsi/Kab/Kota baik yang melalui Program Kerjasama Direktorat PSLB-MCPM-AIBEP, maupun Program Swakelola/ Mandiri) dapat terjamin kualitasnya.
2. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif* menjadi salah satu *referensi* dan '*Guidance*' atau panduan bagi Dinas Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka mengembangkan pendidikan inklusif di daerahnya masing-masing.
3. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif* digunakan sebagai alat Monitoring dan Evaluasi Diri sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, sehingga pembinaan terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
4. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif* digunakan sebagai bahan pembekalan para pelaksana lapangan (Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan pihak terkait lainnya) dalam melakukan pengelolaan sekolah inklusif yang baik dan benar sesuai dengan kondisi, situasi dan ketentuan yang berlaku.
5. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif* digunakan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan ABK dalam memahami pendidikan inklusif, sehingga mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat yang lebih optimal dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

RUANG LINGKUP ISI MODUL

Ruang lingkup isi modul mencakup pendahuluan dan tujuh modul. Dalam setiap modul membahas satu topik yang memuat deskripsi topik, tujuan, strategi pelatihan, uraian materi, evaluasi, dan tindak lanjut. Berikut penjelasan singkat ruang lingkup modul.

PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian tentang sejarah perkembangan kebijakan dan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia yang meliputi lima fase (fase uji coba, sosialisasi, penguatan institusi, regulasi, dan pembinaan dan pengembangan); tujuan dan sasaran utama penggunaan modul, dan ruang lingkup isi modul

MODUL I : LANDASAN DAN KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF

Modul I memuat penjelasan tentang landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan pedagogis, landasan empiris, konsep dasar, prinsip-prinsip, dan nilai positif pendidikan inklusif. Tujuannya adalah agar para peserta pelatihan mampu memahami landasan, konsep dasar dan prinsip pendidikan inklusif.

MODUL II : PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF

Modul II memuat penjelasan tentang strategi implementasi pendidikan inklusif terkait dengan peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum dan pembelajaran, sistem evaluasi, sarana dan prasarana, manajemen sekolah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar para peserta pelatihan dan pemakai modul mampu mengimplementasikan pendidikan inklusif.

MODUL III : IDENTIFIKASI DAN ASESMEN ABK

Modul III berisi penjelasan tentang pengertian, tujuan, sasaran, serta pelaksanaan identifikasi dan asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Beberapa contoh instrumen identifikasi juga disertakan dalam modul ini. Tujuannya adalah agar para peserta pelatihan mampu melakukan proses penjaringan dan penyaringan ABK secara tepat sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kewenangannya.

MODUL IV : PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM, SILABUS DAN RPP

Modul IV memuat penjelasan tentang pengembangan kurikulum, silabus, RPP dan penilaian serta beberapa contoh pendukung yang diperlukan. Tujuannya adalah agar para peserta pelatihan mampu mengembangkan kurikulum, silabus, RPP dan penilaian sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.

MODUL V : MEDIA PEMBELAJARAN DAN PERALATAN KHUSUS

Modul memuat penjelasan tentang berbagai jenis media pembelajaran dan peralatan khusus yang dilengkapi dengan contoh-contoh sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Tujuannya adalah agar para peserta pelatihan mampu merancang, membuat dan menggunakan media pembelajaran dan peralatan khusus sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang berbasis sumber daya lokal.

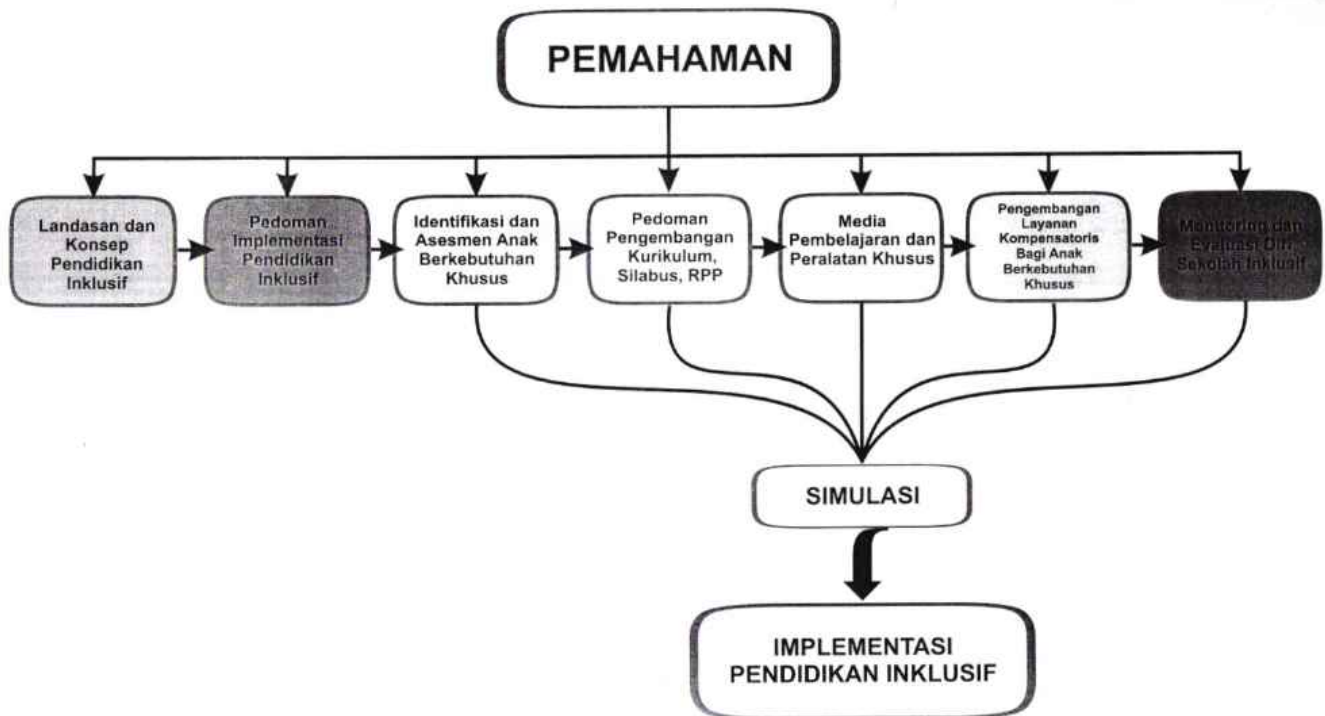
MODUL VI : PENGEMBANGAN LAYANAN KOMPENSATORIS BAGI ABK

Modul VI memuat penjelasan tentang bentuk-bentuk layanan kompensatoris sesuai dengan hambatan yang dialami setiap jenis kelainan, meliputi: orientasi dan mobilitas serta baca tulis Braille, layanan bina komunikasi persepsi bunyi dan irama, layanan binadiri, layanan binagerak, layanan bina pribadi dan sosial, layanan modifikasi perilaku dan komunikasi. Tujuannya adalah agar para peserta pelatihan mampu dalam menyusun, melaksanakan, menilai, dan memberi tindak lanjut program layanan kompensatoris bagi anak berkebutuhan khusus.

MODUL VII : MONITORING DAN EVALUASI DIRI SEKOLAH INKLUSIF

Modul VII memuat penjelasan tentang pengembangan instrumen, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, analisis data hasil monev dan interpretasinya. Tujuannya adalah agar para peserta pelatihan mampu melakukan proses monitoring dan evaluasi serta mampu membuat laporan dari hasil monitoring yang telah dilaksanakan.

TINJAUAN ALIR MODUL PELATIHAN PENDIDIKAN INKLUSIF



DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN	ii
PENDAHULUAN	iii
TINJAUAN ALIR MODUL PELATIHAN PENDIDIKAN INKLUSIF	iv
DAFTAR ISI	v
MODUL I LANDASAN DAN KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF	
A. Deskripsi	01
B. Tujuan	01
C. Strategi Pelatihan	01
D. Media	02
E. Materi	02
F. Tindak Lanjut	15
G. Evaluasi	15
H. Referensi	15
MODUL II PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF	
A. Deskripsi	16
B. Tujuan	16
C. Strategi Pelatihan	16
D. Media	17
E. Materi	17
F. Tindak Lanjut	17
G. Evaluasi	29
H. Referensi	29
MODUL III IDENTIFIKASI DAN ASESMEN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	
A. Deskripsi	31
B. Tujuan	32
C. Strategi Pelatihan	32
D. Materi	33

MODUL IV PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM, SILABUS DAN RPP

A. Deskripsi	72
B. Tujuan	72
C. Strategi Pelatihan	72
D. Materi	73
E. Rangkuman	98
F. Evaluasi	98
G. Tindak Lanjut	99

MODUL V MEDIA PEMBELAJARAN DAN PERALATAN KHUSUS

A. Deskripsi	109
B. Tujuan	109
C. Strategi Pelatihan	109
D. Materi	110

MODUL VI PENGEMBANGAN LAYANAN KOMPENSATORIS BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

A. Deskripsi	152
B. Tujuan	152
C. Strategi Pelatihan	152
D. Materi	153

MODUL VII MONITORING DAN EVALUASI DIRI SEKOLAH INKLUSIF

A. Deskripsi	191
B. Tujuan	191
C. Strategi Pelatihan	191
D. Skenario Pelatihan	192
E. Materi	192
F. Evaluasi	198
G. Tindak Lanjut	198



MODUL I

LANDASAN DAN KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF

Content

Pengertian Pendidikan Inklusif

Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Landasan Filosofis

Landasan Yuridis

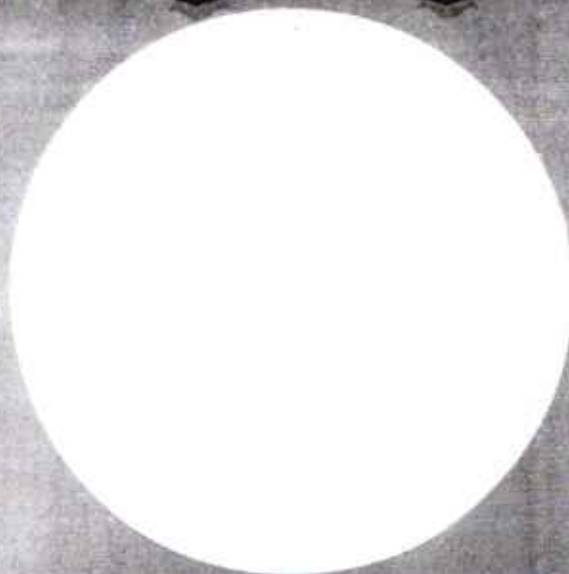
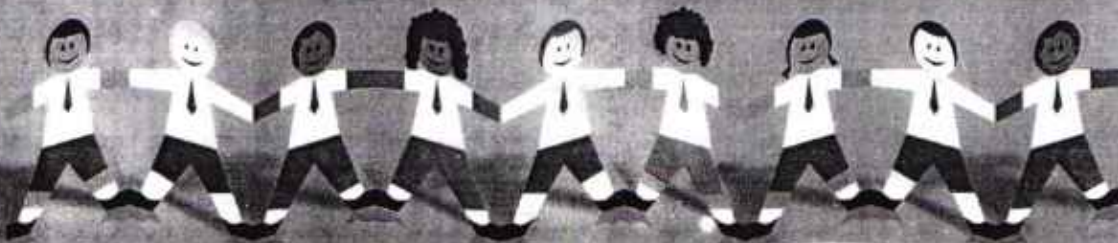
Landasan Pedagogis

Landasan Empiris

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Keutamaan dan Sisi Positif Pendidikan Inklusif

Implikasi Pengelolaan Pendidikan Inklusif



*"The important thing is not so much that every child should be taught,
as that every child should be given the wish to learn."*

*"Hal yang penting bukanlah setiap anak harus diberi pelajaran,
tetapi bahwa setiap anak seharusnya diberikan keinginan untuk belajar."*

(John Lubbock)



A. Deskripsi

Modul 1 Landasan dan Konsep Pendidikan Inklusif ini berisi uraian tentang pengertian pendidikan inklusif, landasan filosofis, yuridis, pedagogis dan empiris, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif, keunggulan pendidikan inklusif, dan implikasinya pada pengelolaan pendidikan inklusif.

B. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, peserta pelatihan diharapkan mampu,

1. Menjelaskan pengertian pendidikan inklusif.
2. Menunjukkan pemahamannya tentang landasan filosofis, yuridis, pedagogis dan empiris sebagai dasar pendidikan inklusif.
3. Menjelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif.
4. Menunjukkan keunggulan dan sisi positif pelaksanaan pendidikan inklusif.
5. Menjelaskan implikasi pengelolaan pendidikan inklusif.

C. Strategi Pelatihan

1. Visualisasi

Peserta diajak menonton film yang berjudul "Aku Ingin Sekolah". Film ini berdurasi 24 menit. Pada tahap awal, film diputar 10 menit lalu dihentikan (pause), dilanjutkan dengan dialog interaktif.

2. Dialog Interaktif

- a. Peserta diajak berdialog secara interaktif tentang "hal-hal yang menarik dari tayangan mengarah pada layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pandangan umum orang tua, masyarakat, dan tokoh".
- b. Dalam dialog interaktif tersebut, pelatih menggali jawaban peserta mengarah pada materi satu (1) pengertian pendidikan inklusif dan materi dua (2) landasan filosofis, pedagogis, dan empiris pendidikan inklusif.
- c. Melanjutkan menonton film "Aku Ingin Sekolah" hingga selesai.
- d. Dilanjutkan dengan dialog interaktif, pelatih mengarahkan dialog pada materi 3 penyelenggaraan pendidikan inklusif dan materi empat (4) dan lima (5) dengan menggali jawaban sementara tentang "keunggulan, sisi positif pendidikan inklusif dan implikasinya pada proses pembelajaran di kelas"

3. Penyampaian Materi Keseluruhan (Ceramah Bervariasi)

4. Penyimpulan Materi

5. Penutup, peserta menonton film "Merenda Hari Esok" (jika waktu masih ada)



Gambaran keseluruhan strategi pelatihan tersebut, diskemakan sebagai berikut.

Visualisasi
Menonton Film 10'

Dialog Interaktif
Materi 1 dan 2

Menonton Film
sampai selesai

Dialog Interaktif
materi 3,4,5

Menonton Film
'Merenda Hari Esok'
(Sisa waktu)

Penyimpulan
Materi

Penyampaian
Materi Keseluruhan

Gambar 1.1 Prosedur Pelatihan

D. Media

Media untuk visualisasi materi yang digunakan dalam pelatihan terdiri atas:

1. Film pendidikan inklusif: "**Aku Ingin Sekolah**"
2. Film pendidikan inklusif: "**Merenda Hari Esok**"

E. Materi

Hambatan utama anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan meraih sukses, termasuk dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin bukan pada kecacatannya, tetapi lebih pada penerimaan sosial masyarakat. Hambatan sosial inilah yang paling sulit dihadapi oleh anak. Bahkan, dapat dikatakan hambatan dalam diri anak berkelainan, umumnya disebabkan pandangan sosial yang negatif terhadap dirinya. Padahal, selama tersedia alat dan penanganan khusus, mereka akan dapat mengatasi hambatan kelainan itu. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan hendaknya memberikan jaminan bahwa setiap anak akan mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan potensinya secara individual. Hal ini sejalan dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama seperti anak lainnya (anak normal) dalam mengakses pendidikan.

Pendidikan inklusif dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi isu yang sangat menarik dalam sistem pendidikan nasional karena pendidikan inklusif memberikan



perhatian pada pengaturan para siswa yang memiliki kelainan untuk bisa mendapatkan pendidikan pada sekolah-sekolah umum/reguler sebagai ganti kelas pendidikan khusus part-time, pendidikan khusus full-time, atau sekolah luar biasa (*segregasi*). D.K. Lipsky dan A.D. Gartner (2000) menyatakan bahwa *"Inclusive education as: providing to all students, including those with significant disabilities, equitable opportunities to receive effective educational services, with the needed supplemental aids and support service, in age-appropriate classes in their neighborhood schools, in order to prepare students for productive lives as full members of society."*

Inklusi adalah suatu sistem ideologi yang dilandasi wawasan kebersamaan. Artinya setiap warga sekolah, meliputi masyarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, petugas administrasi sekolah, para siswa, dan orang tua menyadari tanggung jawab bersama dalam mendidik semua siswa untuk mengoptimalkan potensi agar mereka dapat berkembang secara optimal. Pendidikan inklusif tidaklah sekedar menempatkan siswa berkelainan secara fisik dalam kelas/sekolah reguler dan bukan pula sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus sebanyak mungkin dalam lingkungan belajar siswa normal. Lebih dari itu, inklusi juga berkaitan dengan cara orang dewasa dan teman sekelas yang normal menyambut semua siswa dalam kelas dan mengenali bahwa keberagaman siswa tidak mengharuskan penggunaan pendekatan tunggal untuk seluruh siswa. Dalam perkembangannya, inklusi mencakup para siswa yang dikaruniai keberbakatan, mereka yang hidup terpinggirkan, memiliki kecacatan, dan mereka yang kemampuan belajarnya berada di bawah rata-rata dari kelompoknya.

Pendidikan inklusif, memberikan kesempatan anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa di masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang hidup dalam satu komunitas utuh dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, anak berkelainan perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah terdekat. Tentunya sekolah terdekat tersebut perlu dipersiapkan segala sesuatunya.

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Inklusi mempunyai pengertian yang beragam. Stainback dan Stainback (1990) mengemukakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.



Selanjutnya, Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

Sementara itu, Sapon-Shevin (O Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai system layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak. Artinya, dalam pendidikan inklusif tersedia sumber belajar yang kaya dan mendapat dukungan dari semua pihak, meliputi para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Freiberg, 1995). Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan (berkelainan) yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Bergabungnya anak-anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar bersama anak-anak normal dapat dilakukan dengan 3 model, yaitu: *mainstream*, *integratif* dan *inklusi*. *Mainstream* adalah sistem pendidikan yang menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, mengikuti kurikulum akademis yang berlaku, dan guru juga tidak harus melakukan adaptasi kurikulum. *Mainstream* kebanyakan diselenggarakan untuk anak-anak yang sakit yang tidak berdampak pada kemampuan kognitif, seperti epilepsi, asma dan anak-anak dengan kecacatan sensori (fasilitas peralatan, seperti alat bantu dan buku-buku Braille) dan anak tunadaksa.



Integrasi berarti menempatkan siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler. Di kelas tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus hanya mengikuti pelajaran-pelajaran yang dapat mereka ikuti dari gurunya. Adapun untuk mata pelajaran akademis lainnya, anak-anak berkebutuhan khusus menerima pelajaran pengganti di kelas berbeda yang terpisah dari teman-teman mereka. Penempatan terintegrasi tidak sama dengan integrasi pengajaran dan integrasi sosial, karena integrasi tergantung pada dukungan yang diberikan sekolah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inklusi adalah sebuah filosofi pendidikan dan sosial. Dalam inklusi, semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apapun perbedaan mereka. Pendidikan inklusi berarti bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan, sehingga dapat merespon keanekaragaman siswa yang memungkinkan guru dan siswa merasa nyaman dengan keanekaragaman tersebut, serta melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar daripada melihatnya sebagai suatu problem.

Lebih lanjut, inklusi adalah cara berpikir dan bertindak yang memungkinkan setiap individu merasakan penerimaan dan penghargaan. Prinsip inklusi mendorong setiap unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran mengusahakan lingkungan sekolah yang ramah terhadap pembelajaran dan semua siswa dapat belajar secara efektif bersama-sama. Dengan demikian, tidak ada siswa yang akan ditolak atau dikeluarkan dari sekolahnya disebabkan tidak mampu memenuhi standar akademis yang ditetapkan. Walaupun, pada sisi yang lain beberapa orang tua merasa khawatir kalau anak-anak mereka yang memiliki kecacatan akan menjadi bahan ejekan atau diganggu oleh orang-orang di sekitarnya.

2. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia didasari oleh landasan filosofis, yuridis, pedagogis dan empiris yang kuat, diuraikan sebagai berikut.

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofi adalah seperangkat wawasan atau cara pikir yang menjadi dasar pendidikan inklusi, meliputi filosofi Bhineka Tunggal Ika, agama, pandangan universal, dan filosofi inklusi.



- 1) *Filosofi Bhineka Tunggal Ika*. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang memiliki semboyan 'Bhineka Tunggal Ika'. (berbeda-beda tapi tetap satu jua). Artinya, bangsa Indonesia mengakui keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2) *Pandangan Agama*. Dalam agama-agama di Indonesia (khususnya Islam) ditegaskan bahwa : (1) manusia dilahirkan dalam keadaan suci, (2) kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik tetapi taqwanya, (3) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri (4) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling bersilaturahmi ('inklusif').
- 3) *Pandangan universal Hak azasi* manusia menekankan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan.
- 4) *Pendidikan inklusi* adalah pendidikan yang didasari semangat keterbukaan untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan. Pendidikan Inklusi mengimplementasikan wawasan multikultural dalam pendidikan yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis didasarkan kepada ketentuan undang-undang ada dan telah disahkan, meliputi landasan yuridis berskala Nasional dan Internasional.

Landasan Yuridis Nasional

- 1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31
Ayat (1) : "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".
Ayat (2) : "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".
- 2) UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5
Ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
Ayat (2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus



Ayat (3) Warga negara di daerah terpencil, terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus

Ayat (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

4) UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Pasal 5: Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan".

5) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 127 sampai dengan 142

6) Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003: "Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, SMK".

8) Deklarasi Bandung " **Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif** " tanggal 8-14 Agustus 2004 menetapkan kebijakan sebagai berikut.

a) Menjamin setiap anak berkebutuhan dengan aneka dan anak berkelainan lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.

b) Menjamin setiap anak berkebutuhan khusus dan anak berkelainan lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan



eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural

- c) Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengelolaan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung semua anak dengan berbagai kebutuhan, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
- d) Menjamin kebebasan antar anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan.
- e) Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan serta media lainnya secara berkesinambungan.
- f) Menyusun rencana aksi (action plan) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkebutuhan khusus.
- g) Pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.

9) Deklarasi Bukittinggi (Tahun 2005)

Deklarasi Bukit Tinggi berisi kebijakan yang menetapkan,

- a) Pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk "Pendidikan Untuk Semua" adalah benar-benar untuk semua.
- b) Cara untuk menjamin bahwa semua memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan *anak usia dini, pra-sekolah, pendidikan dasar dan menengah*, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusif.
- c) Kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan *menghormati perbedaan* individu semua warga negara



Landasan Yuridis Internasional

c. Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994)

Article 2: *We believe and pro claim that* (Kami meyakini dan menyatakan bahwa),

- a) *Every child has a fundamental right to education, and must be given the opportunity to achieve and maintain an acceptable level of learning* (Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar),
- b) *Every child has unique characteristics, interests, abilities and learning needs* (Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda)
- c) *Educational systems should be designed and educational programmes implemented to take into account the wide diversity of these characteristics and needs* (Sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut)
- d) *Those with special educational needs must be access to regular schools which should accommodate them within should a child centred pedagogy capable of meeting these needs* (Mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut)
- e) *Regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all; more over, they provide an effective education to the majority of children and improve the efficiency and ultimately the cost-effectiveness of entire education system* (Sekolah reguler dengan orientasi inklusif tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai "Pendidikan untuk Semua", lebih jauh, sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan).



Article 3: *We call upon all governments and urge them to* (Kami meminta perhatian semua pemerintah dan mendesak mereka untuk):

- a) *Give the highest policy and budgetary priority to improve their education systems to enable them to include all children regardless of individual differences or difficulties* (Memberi prioritas tertinggi pada pengambilan kebijakan dan penetapan anggaran untuk meningkatkan sistem pendidikan agar dapat menginklusiikan semua anak tanpa memandang perbedaan-perbedaan ataupun kesulitan-kesulitan individual mereka).
- b) *Adopt as a matter of law or policy the principle of inclusive education, enrolling all children in regular schools, unless there are compelling reasons for doing otherwise* (Menetapkan prinsip pendidikan inklusif sebagai undang-undang atau kebijakan, sehingga semua anak ditempatkan di sekolah reguler kecuali bila terdapat alasan yang sangat kuat)
- c) *Develop demonstration projects and encourage exchanges with countries having experience with inclusive schools* (Mengembangkan proyek percontohan dan mendorong pertukaran pengalaman dengan negara-negara yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan sekolah inklusif).
- d) *Establish decentralized and participatory mechanisms for planning, monitoring and evaluating educational provision for children and adults with special education needs* (Menetapkan mekanisme partisipasi yang terdesentralisasi untuk membuat perencanaan, memantau dan mengevaluasi kondisi pendidikan bagi anak serta orang dewasa penyandang kebutuhan pendidikan khusus).
- e) *Encourage and facilitate the participation of parents, communities and organization of persons with disabilities in the planning and decision-making processes concerning provision for special educational needs* (Mendorong dan memfasilitasi partisipasi orang tua, masyarakat dan organisasi para penyandang cacat dalam perencanaan dan proses pembuatan keputusan yang menyangkut masalah pendidikan kebutuhan khusus)
- f) *Invest greater effort in early identification and intervention strategies, as well as in vocational aspects of inclusive education* (Melakukan upaya yang lebih besar dalam merumuskan dan melaksanakan strategi identifikasi dan intervensi dini, maupun dalam aspek-aspek vokasional dari pendidikan inklusif)



- g) *Ensure that, in the context of a systemic change, teacher education programmes, both pre-service and in-service, address the provision of special needs education in inclusive schools* (Demi berlangsungnya perubahan sistemik, menjamin agar program pendidikan guru, baik pendidikan pra-dinas maupun dalam dinas, membahas masalah pendidikan kebutuhan khusus di sekolah inklusif)

d. Landasan Pedagogis

Landasan pedagogis tercermin pada pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal anak berkebutuhan khusus diisolasi dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya.

e. Landasan Empiris

Penelitian tentang pendidikan inklusi telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an. Di antaranya, penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *the National Academy of Sciences* (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman & Messick, 1982). Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak berkelainan secara tepat, karena karakteristik mereka yang sangat heterogen (Baker, Wang, dan Walberg, 1994/1995).

Temuan survey Prisoner (2003) kepada kepala sekolah tentang sikap mereka terhadap pendidikan inklusif menunjukkan bahwa hanya satu dari lima kepala sekolah (20%) memiliki sikap yang positif terhadap penerapan pendidikan inklusif. Sementara yang lainnya tidak sikapnya jelas. Lebih lanjut, dalam kelas yang dipimpin oleh Kepala yang memiliki sikap positif tersebut, siswa lebih mungkin dididik dengan cara-cara yang sedikit tidak dibenarkan dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian tentang sikap guru, Mcleskey Waldron, So,



Swanson, dan Loveland (2001) menemukan bahwa guru-guru dalam sekolah inklusif lebih memiliki sikap positif terhadap peran guru inklusi dan dampaknya daripada guru pada sekolah reguler. Lebih lanjut, Meyer (2001) mengatakan bahwa siswa yang memiliki kecacatan yang cukup ditemukan untuk memiliki keberhasilan yang lebih besar manakala mereka memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang menerima mereka, khususnya yang berkaitan dengan hubungan sosial dan persahabatan mereka dengan masyarakatnya.

3. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

a. Prinsip Pemerataan dan Peningkatan Mutu

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan karena lembaga pendidikan inklusi bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa memberikan akses bagi semua anak dan menghargai perbedaan.

b. Prinsip Kebutuhan Individual

Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak.

c. Prinsip Kebermaknaan

Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.

d. Prinsip Keberlanjutan

Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.

e. Prinsip Keterlibatan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

4. Keunggulan dan Sisi Positif Pendidikan Inklusif

Beberapa alasan pendidikan inklusif harus diimplementasikan, sebagai berikut.

- a. Semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasi.



- b. Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.
- c. Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak.
- d. Sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

Adapun sisi positif implementasi pendidikan inklusif, antara lain:

- a. Membangun kesadaran dan konsensus pentingnya Pendidikan Inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif.
- b. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan setempat
- c. Memberikan kesempatan kepada semua anak dan mengidentifikasi alasan-alasan yang menyebabkan mereka tidak sekolah.

5. Implikasi Pengelolaan Pendidikan Inklusif

Salah satu karakteristik terpenting dari sekolah inklusi adalah terbentuknya satu komunitas yang kohesif, menerima dan responsif pada kebutuhan individual siswa. Selaras dengan hal ini Sapon-Shevin (dalam Sunardi, 2002) mengemukakan lima profil pembelajaran di sekolah inklusi, diuraikan sebagai berikut.

- a. Pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana dan perilaku sosial yang menghargai perbedaan, mencakup perbedaan kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. Pendidikan inklusi berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas.
- b. Mengajar kelas yang heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar. Pembelajaran di kelas inklusi akan bergeser dari pendekatan pembelajaran kompetitif yang kaku, mengacu materi tertentu, ke pendekatan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antarsiswa, dan bahan belajar tematik.
- c. Pendidikan inklusi berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional yang berfokus pada guru, berjuang sendirian mengatur dan mengendalikan siswa di kelas harus bergeser dengan



model antar siswa saling bekerjasama, saling mengajar dan belajar, dan secara aktif saling berpartisipasi dan bertanggungjawab terhadap pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. Semua anak berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi melainkan untuk saling belajar dan mengajar dengan yang lain. Guru memfasilitasi kebutuhan anak agar dapat berkembang maksimal.

- d. Pendidikan inklusi berarti penyediaan dukungan, dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Meskipun guru selalu berinteraksi dengan orang lain, pekerjaan mengajar dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusif adalah bekerja dengan tim, kolaborasi dan konsultasi, dan berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan, dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak. Kerjasama antara guru dengan profesi lain dalam suatu tim sangat diperlukan, seperti dengan paraprofessional, ahli bina bicara, petugas bimbingan, guru pembimbing khusus, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk dapat bekerjasama dengan orang lain secara baik memerlukan pelatihan dan dorongan secara terus-menerus.
- e. Pendidikan inklusi berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung kepada partisipasi aktif orang tua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan Program Pengajaran Individual (PPI) dan bantuan dalam belajar di rumah.

Berkaitan dengan profil pembelajaran di sekolah inklusi tersebut, hal-hal berikut harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

- a. Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif
- b. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi dan sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- c. Guru dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan.
- d. Kepala sekolah dan guru yang nantinya akan menjadi Guru Pembimbing Khusus (GPK) harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusi.
- e. GPK mendapatkan pelatihan teknis dalam memfasilitasi ABK
- f. Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui anak ABK dan tindakan yang



- diperlukan. Mengadakan bimbingan khusus atas kesepahaman dan kesepakatan dengan orangtua ABK.
- g. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial dan masalah lainnya dalam mengakses fasilitas dan pembelajaran.
 - h. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak.

F. Tindak Lanjut

Kegiatan penting setelah mempelajari modul ini adalah peserta melakukan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan guru dan siswa untuk membahas pentingnya pendidikan bagi ABK, hal-hal yang menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif di lingkungannya dan solusinya.

G. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian pendidikan inklusif?
2. Jelaskan landasan filosofis, yuridis, pedagogis dan empiris pendidikan inklusif?
3. Jelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif?
4. Uraikan keunggulan dan sisi positif pelaksanaan pendidikan inklusif bagi guru, siswa dan orang tua?
5. Jelaskan implikasi pengelolaan pendidikan inklusif bagi sekolah penyelenggara.

Referensi:

- Depdiknas. 2003. *Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2002. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas.
- Karten, T.J. 2005. *Inclusion Strategies That Work!* California: Corwin Press.
- Salend, S.J., & Duhaney, L.G., *The Impact of Inclusion on Students with and without Disabilities and their Educators. Remedial and Special Education*, Vol. 20, 1999
- Sharpe, York. & Kninght. 1994. *Effect of Inclusion on the Academic Performance of Classmates Without Disabilities, Remedial and Special Education*, 15

MODUL II

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF



Content

Peserta Didik

Sasaran
Identifikasi Anak Berkelainan
Asesmen

Kurikulum

Jenis Kurikulum
Tujuan Pengembangan Kurikulum
Model Pengembangan Kurikulum

Tenaga Pendidik

Kegiatan Pembelajaran

Perencanaan
Pelaksanaan
Prinsip Prinsip Pembelajaran

Penilaian dan Sertifikasi

Manajemen Sekolah
Penghargaan dan Sanksi
Pemberdayaan Masyarakat



• *"Children have never been very good at listening to their elders,
but they have never failed to imitate them."*

*"Anak-anak tidak pernah pandai mendengarkan apa yang dikatakan para orang tua/guru,
tetapi mereka tidak pernah gagal dalam meniru mereka."*

(James Baldwin)



A. Deskripsi

Modul 2 Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusif berisi uraian tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan oleh pemangku berkepentingan (*stakeholder*) sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal-hal yang harus dipersiapkan tersebut, terdiri atas delapan komponen, yaitu peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen sekolah dan pemberdayaan masyarakat.

B. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta mampu memahami persiapan-persiapan yang diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal-hal yang harus dipersiapkan terdiri atas delapan komponen, meliputi peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen sekolah, dan pemberdayaan masyarakat.

C. Strategi Pelatihan

Strategi pelatihan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Dialog interaktif

Dialog interaktif dilaksanakan pada awal pelatihan. Peserta diajak berdiskusi tentang (1) pengertian pendidikan inklusif, (2) alasan-alasan pendidikan inklusif harus diimplementasikan, (3) keuntungan melaksanakan pendidikan inklusif bagi guru dan siswa.

2. Ceramah bervariasi

Ceramah bervariasi untuk menyampaikan materi modul dua (2), meliputi peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen sekolah, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Visualisasi

Peserta diajak menonton film berdurasi 10 menit produksi MCPM-AIBEP bekerjasama dengan Depdiknas yang bertema: "Pendidikan Inklusif"

4. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok tayangan dalam film, dipandu dengan pertanyaan berikut,

- a. Apa saja yang mesti dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru dan Orang Tua agar ABK termotivasi untuk datang ke sekolah reguler sebagai siswa inklusif?
- b. Bagaimana upaya guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi semua anak?

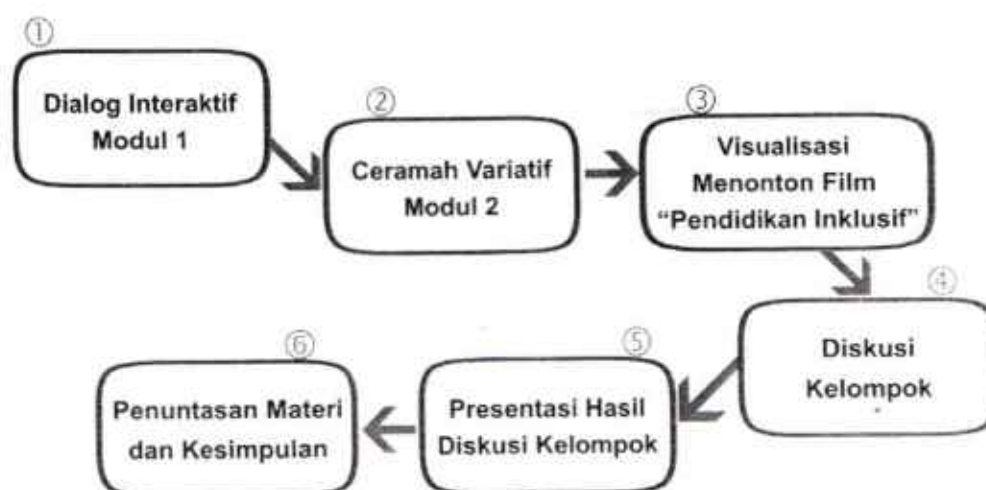


- c. Bagaimana Kepala Sekolah melaksanakan fungsi manajemen sehingga pendidikan inklusif berjalan secara baik?
- d. Bagaimana Sekolah bersama-sama pemerintah dalam menyediakan kebutuhan SDM (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan GPK untuk melayani ABK?
- e. Pertanyaan lain dapat ditambahkan.

5. Presentasi hasil diskusi kelompok

6. Penuntasan dan penyimpulan materi

Berdasarkan strategi pelatihan prosedur pelatihan diskemakan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Prosedur Pelatihan

D. Media

Film pendidikan inklusif, produk MCPM-AIBEP

E. Materi

1. Peserta Didik

a. Sasaran

Sasaran pendidikan inklusif secara umum adalah semua peserta didik yang ada di sekolah reguler. Tidak hanya mereka yang sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mereka yang termasuk anak 'normal'. Mereka secara keseluruhan harus memahami dan menerima keanekaragaman dan perbedaan individu.

Secara khusus, sasaran pendidikan inklusif adalah setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Peserta didik ini terdiri atas anak yang mengalami kelainan,



- 1) tunarungu;
- 2) tunawicara;
- 3) tunagrahita;
- 4) tunadaksa;
- 5) tunalaras;
- 6) berkesulitan belajar;
- 7) lamban belajar;
- 8) autisme;
- 9) memiliki gangguan motorik;
- 10) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- 11) memiliki kelainan lainnya;
- 12) tunaganda.

b. Identifikasi Anak Berkelainan

1) Hakikat Identifikasi

Istilah identifikasi dimaknai sebagai proses penjarangan, sedangkan assesment dimaknai sebagai penyaringan. Identifikasi dilaksanakan oleh orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya sebagai upaya untuk melakukan proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional/tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak-anak berkelainan yang perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program inklusi.

2) Tujuan Identifikasi

Identifikasi anak berkelainan dilakukan untuk lima keperluan, yaitu: penjarangan (*screening*), pengalihanganan (*referral*), pengklasifikasian, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar.

c. Assessment

1) Pengertian

Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi sebelum program Pembelajaran disusun. Asesmen ini dimaksudkan untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajarnya.



2) Fungsi

Fungsi Asesmen, meliputi hal-hal berikut.

1) *Fungsi screening/penyaringan*

Asesmen digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang kemungkinan mengalami problem belajar.

2) *Fungsi pengalihan/transfer/referal*

Asesmen digunakan sebagai alat untuk pengalihan kasus. Dari kasus pendidikan menjadi kasus kesehatan, kasus kejiwaan, ataupun kasus sosial ekonomi. Dalam asesmen ada hal-hal yang tidak mungkin ditangani oleh guru sendiri, sehingga memerlukan keterlibatan profesional lain.

3) *Fungsi perencanaan pembelajaran individual (PPI)*

Berdasarkan data kegiatan asesmen akan diperoleh gambaran berbagai potensi maupun hambatan yang dialami anak. Misalnya keterbelakangan mental, gangguan motorik, persepsi, memori, komunikasi, dan adaptasi sosial.

4) *Fungsi monitoring kemajuan belajar*

Fungsi ini untuk memonitor kemajuan belajar yang dicapai siswa.

5) *Fungsi evaluasi program*

Hasil asesmen dimanfaatkan untuk mengevaluasi program pembelajaran yang telah dilaksanakan.

d. Sasaran

Sasaran asesmen adalah:

- 1) Anak berkelainan yang sudah bersekolah di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- 2) Anak berkelainan yang akan masuk ke Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- 3) Anak berkelainan yang belum/tidak bersekolah
- 4) Anak berkelainan yang akan mengikuti program pendidikan non formal atau informal.

2. Kurikulum

a. Jenis Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya adalah kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum.



Namun demikian, karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkelainan sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri atas kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.

b. Tujuan Pengembangan Kurikulum

Tujuan pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif, antara lain adalah,

- 1) Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami siswa semaksimal mungkin dalam setting inklusi.
- 2) Membantu guru dan orangtua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik yang diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah maupun di rumah.
- 3) Menjadi pedoman bagi sekolah, dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai dan menyempurnakan program pendidikan inklusif.

c. Model Pengembangan Kurikulum

1) Model kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai standar nasional
Pada model kurikulum ini, peserta didik yang berkelainan mengikuti kurikulum satuan pendidikan seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi dan ketekunan belajarnya.

2) Model kurikulum akomodatif

Model kurikulum akomodatif adalah kurikulum yang dimodifikasi sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Modifikasi dapat dilakukan pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan siswa (anak berkelainan).

3. Tenaga Pendidik

a. Pengertian

Tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan



mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pembimbing khusus (GPK).

b. Tugas

- 1) Tugas Guru Kelas antara lain sebagai berikut
 - a) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
 - b) Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya
 - c) Menyusun program pembelajaran dengan kurikulum modifikasi bersama-sama dengan guru pembimbing khusus (GPK).
 - d) Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan penilaian untuk semua mata pelajaran (kecuali Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan) yang menjadi tanggung jawabnya.
 - e) Memberikan program remedi pengajaran (*remedial teaching*), pengayaan/percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.
 - f) Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Tugas guru mata pelajaran antara lain sebagai berikut:
 - a) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
 - b) Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya
 - c) Menyusun program pembelajaran dengan kurikulum modifikasi bersama-sama dengan guru pembimbing khusus (GPK).
 - d) Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan penilaian kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 - e) Memberikan program Perbaikan (*remedial teaching*), pengayaan/percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.
- 3) Tugas Guru Pendidikan Khusus antara lain sebagai berikut
 - a) Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran
 - b) Membangun system koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik.



- c) Melaksanakan pendampingan anak berkelainan pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi.
- d) Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan.
- e) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkelainan selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
- f) Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkelainan.

4) Kedudukan Guru

Guru berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan pada usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan untuk masing-masing guru secara rinci adalah sebagai berikut.

- a) Guru kelas kedudukannya di sekolah dasar ditetapkan berdasarkan kualifikasi dengan persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah.
- b) Guru mata pelajaran/bidang studi kedudukannya adalah mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan di sekolah.
- c) Guru pembimbing khusus berkedudukan sebagai guru pendamping khusus. Secara administrasi status kepegawaiannya meliputi beberapa alternative yang memungkinkan

4. Kegiatan Pembelajaran

a. Perencanaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran pada kelas inklusif antara lain sebagai berikut.

- 1) Merencanakan pengelolaan kelas
- 2) Merencanakan pengorganisasian bahan
- 3) Merencanakan strategi pendekatan kegiatan belajar mengajar
- 4) Merencanakan prosedur kegiatan belajar mengajar
- 5) Merencanakan penggunaan sumber dan media belajar
- 6) Merencanakan penilaian



b. Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan apersepsi
- 2) Menyajikan materi/bahan pelajaran
- 3) Mengimplementasikan metode, sumber/media belajar, dan bahan latihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran
- 4) Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif
- 5) Mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan
- 6) Membina hubungan antar pribadi, antara lain: (1) Bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa; (2) Menampilkan kegairahan dan kesungguhan; (3) Mengelola interaksi antar pribadi.

c. Prinsip-Prinsip Pembelajaran

1) Prinsip motivasi

Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar.

2) Prinsip latar/konteks

Guru harus mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan-pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi anak.

3) Prinsip keterarahan

Setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat

4) Prinsip hubungan sosial

Dalam kegiatan belajar-mengajar, guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah.

5) Prinsip belajar sambil bekerja

Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan, atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya.



6) Prinsip individualisasi

Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai.

7) Prinsip menemukan

Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlibat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, dan atau emosional.

8) Prinsip pemecahan masalah

Guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan/problem yang ada di lingkungan sekitar, dan anak dilatih untuk merumuskan, mencari data, menganalisis, dan memecahkannya sesuai dengan kemampuannya.

5. Penilaian dan Sertifikasi

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya. Dengan demikian, penilaian dalam setting inklusif ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan, yakni kurikulum berstandar nasional atau model modifikatif. Penerapannya perhatikan hal-hal berikut.

- a. Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan
- b. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- c. Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- d. Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- e. Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.



- f. Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

6. Manajemen Sekolah

a. Konsep Manajemen

Istilah manajemen sekolah acap kali disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Berkaitan dengan hal ini, terdapat tiga pandangan berbeda. Pertama, mengartikan administrasi lebih luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi) kedua melihat manajemen lebih luas daripada administrasi (administrasi merupakan inti dari manajemen) dan ketiga yang menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi.

Dalam modul ini, istilah manajemen diartikan sama dengan istilah administrasi atau pengelolaan, yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.

b. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen pendidikan inklusif meliputi

- 1) Perencanaan (*Planning*)
- 2) Pengorganisasian (*organizing*)
- 3) Pengarahan (*directing*)
- 4) Pengkoordinasian (*coordinating*)
- 5) Pengawasan (*controlling*), dan
- 6) Penilaian (*evaluation*)

c. Ruang Lingkup Manajemen

Manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, merupakan kewenangan penuh pihak sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan, meliputi komponen-komponen berikut.

- 1) Manajemen kesiswaan
- 2) Manajemen kurikulum
- 3) Manajemen pembelajaran
- 4) Manajemen penilaian
- 5) Manajemen ketenagaan
- 6) Manajemen sarana-prasarana



- 7) Manajemen pembiayaan
- 8) Manajemen sumberdaya lingkungan

d. Pelaksanaan Manajemen

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah inklusif perlu didukung kemampuan manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber daya, baik sumberdaya personal maupun sumber daya sarana prasarana secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Tidak kalah pentingnya adalah sekolah harus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat, perkembangan, dan karakteristik peserta didik agar lulusan memiliki kompetensi untuk bekal hidup (*life skill*).

Implikasi dari perubahan fungsi sekolah umum menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah kemungkinan adanya perubahan struktur organisasi sekolah. Alternatif struktur organisasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk satuan pendidikan, adalah sebagai berikut.

- 1) Struktur Organisasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah



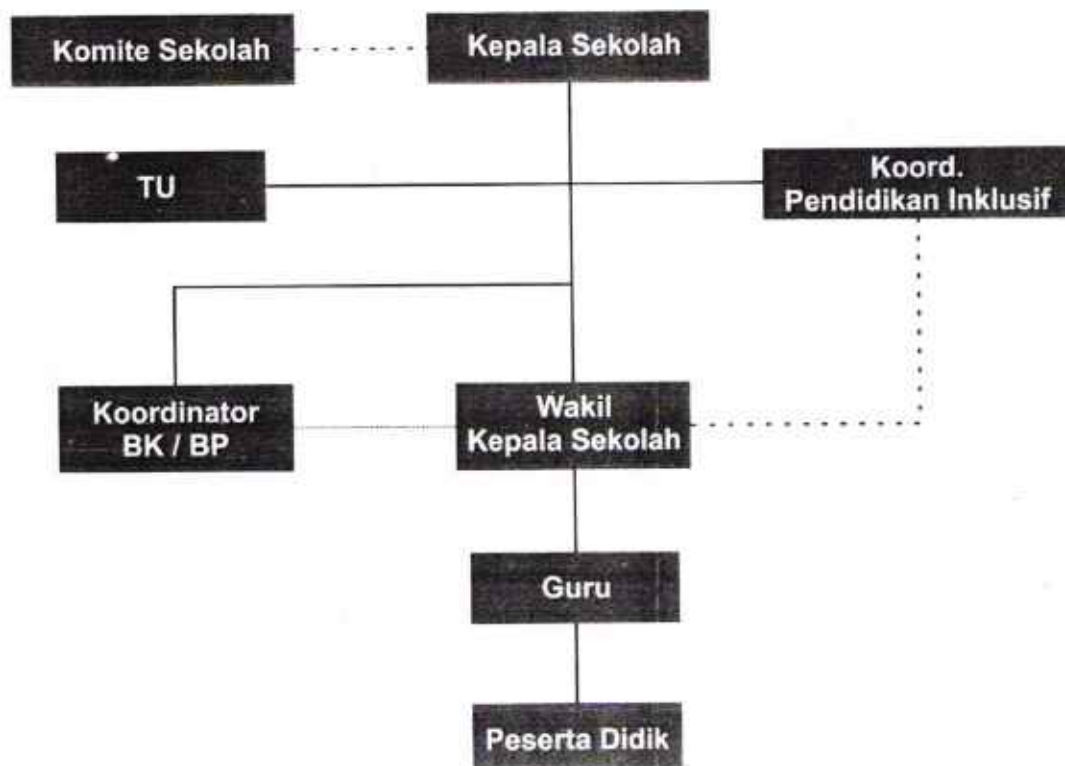
Keterangan:

———— : Garis Komando

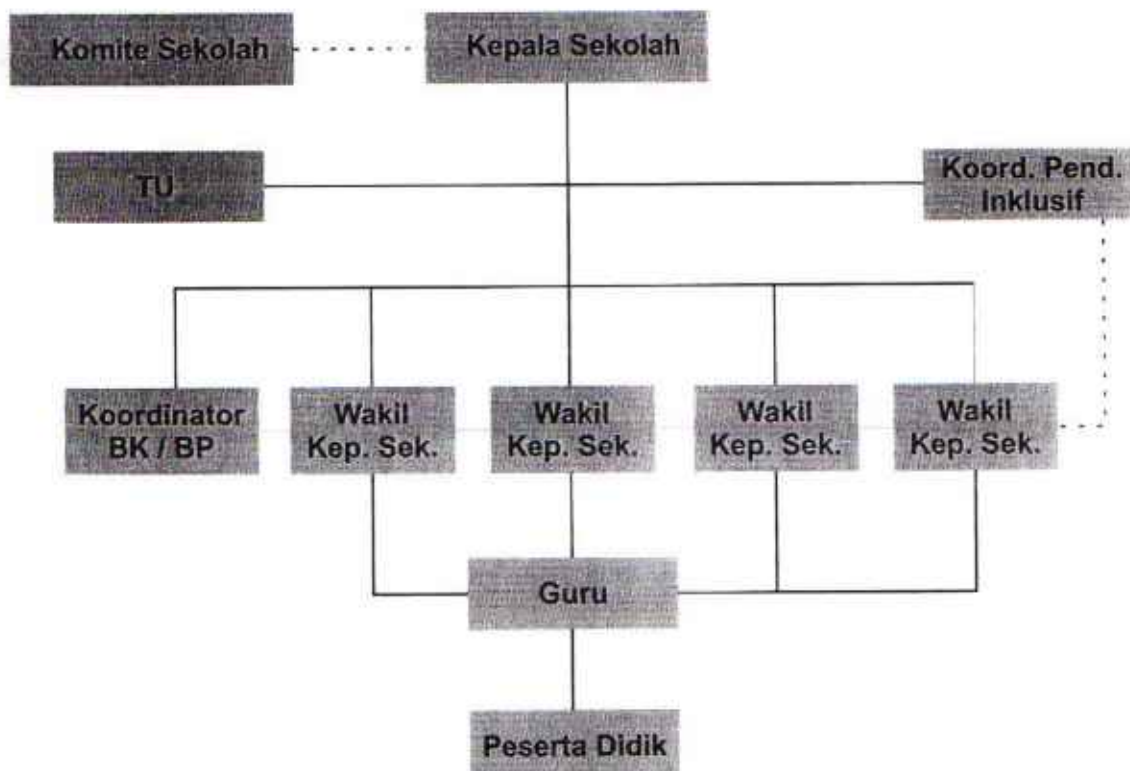
..... : Garis Koordinasi



2) Struktur organisasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah



7) Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.





7. Penghargaan dan Sanksi

a. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penghargaan dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Penghargaan dapat berupa simbol, seperti sertifikat, piagam, dan dapat pula dalam bentuk lain, seperti promosi, dana pembinaan, pelatihan, maupun dalam bentuk lain yang relevan.

b. Sanksi

Satuan pendidikan tertentu yang telah memperoleh surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari Dinas Pendidikan Propinsi, apabila dinilai lalai dalam melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Berat ringannya sanksi disesuaikan dengan tingkat kelalaiannya. Jenis-jenis sanksi yang diberikan dapat berupa: teguran, peringatan tertulis, maupun dalam bentuk pembatalan surat ketetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

8. Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, para pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara optimal.

Partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain adalah (1) perencanaan; (2) penyediaan tenaga ahli/profesional terkait; (3) pengambilan keputusan; (4) pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi; (5) pendanaan; (6) pengawasan; dan (7) penyaluran lulusan. Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan inklusi dapat diakomodasikan melalui Wadah: (1) Komite sekolah, (2) dewan pendidikan; (3) forum-forum pemerhati pendidikan inklusif.

Dalam rangka optimalisasi sumber daya masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif, diperlukan upaya sistematis dan sistemik peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut dapat berbentuk peran langsung, seperti bantuan tenaga/keahlian, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, keterlibatan dalam tim pengelola dan berbentuk peran tidak langsung, seperti bantuan pemikiran untuk pengambilan kebijakan, bantuan akses dan jaringan, pengembangan kurikulum, pengawasan, dan lain-lain.



F. Tindak Lanjut

Setelah mempelajari modul ini, peserta:

1. Melakukan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolahnya.
2. menyusun rencana tindak lanjut (action plan) implementasi program pendidikan inklusif untuk sekolahnya

G. Evaluasi:

1. Mengapa pendidikan inklusif harus diimplementasikan?
2. Apa saja keuntungan melaksanakan pendidikan inklusif bagi guru dan siswa?
3. Apa saja yang mesti dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru dan Orang Tua agar ABK termotivasi untuk datang ke sekolah reguler sebagai siswa inklusif?
4. Bagaimana upaya guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi semua anak?
5. Bagaimana Kepala Sekolah melaksanakan fungsi manajemen sehingga pendidikan inklusif berjalan secara baik?
6. Bagaimana Sekolah bersama-sama pemerintah dalam menyediakan kebutuhan SDM (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan GPK untuk melayani ABK?

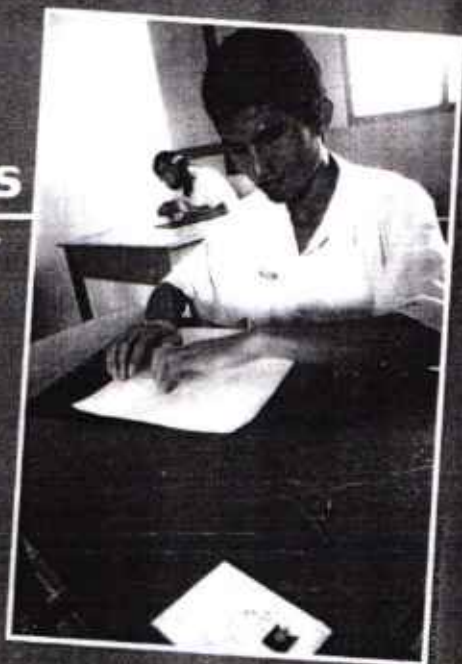


Referensi:

- Depdiknas. 2004. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus)*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Pengembangan Kurikulum)*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Kegiatan Pembelajaran)*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Penilaian)*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif)*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik)*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Kebutuhan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan)*.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Pemberdayaan Masyarakat)*.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Bimbingan Konseling)*. Jakarta: Depdiknas.
- Smith, Corinne and Strick, Lisa, *Learning Disabilities: A to Z A Parent's Complete Guide to Learning Disabilities from Preschool to Adulthood*, New York: Smon & Shuster, 1999

MODUL III

IDENTIFIKASI DAN ASESMEN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS



Content

Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Pengertian

Tujuan

Sasaran Identifikasi

Strategi Pelaksanaan Identifikasi

Jenis dan Karakteristik ABK

Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus

Pengertian

Tujuan

Sasaran Asesmen

Strategi Pelaksanaan Asesmen

Asesmen Akademik dan Non Akademik

Alat Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

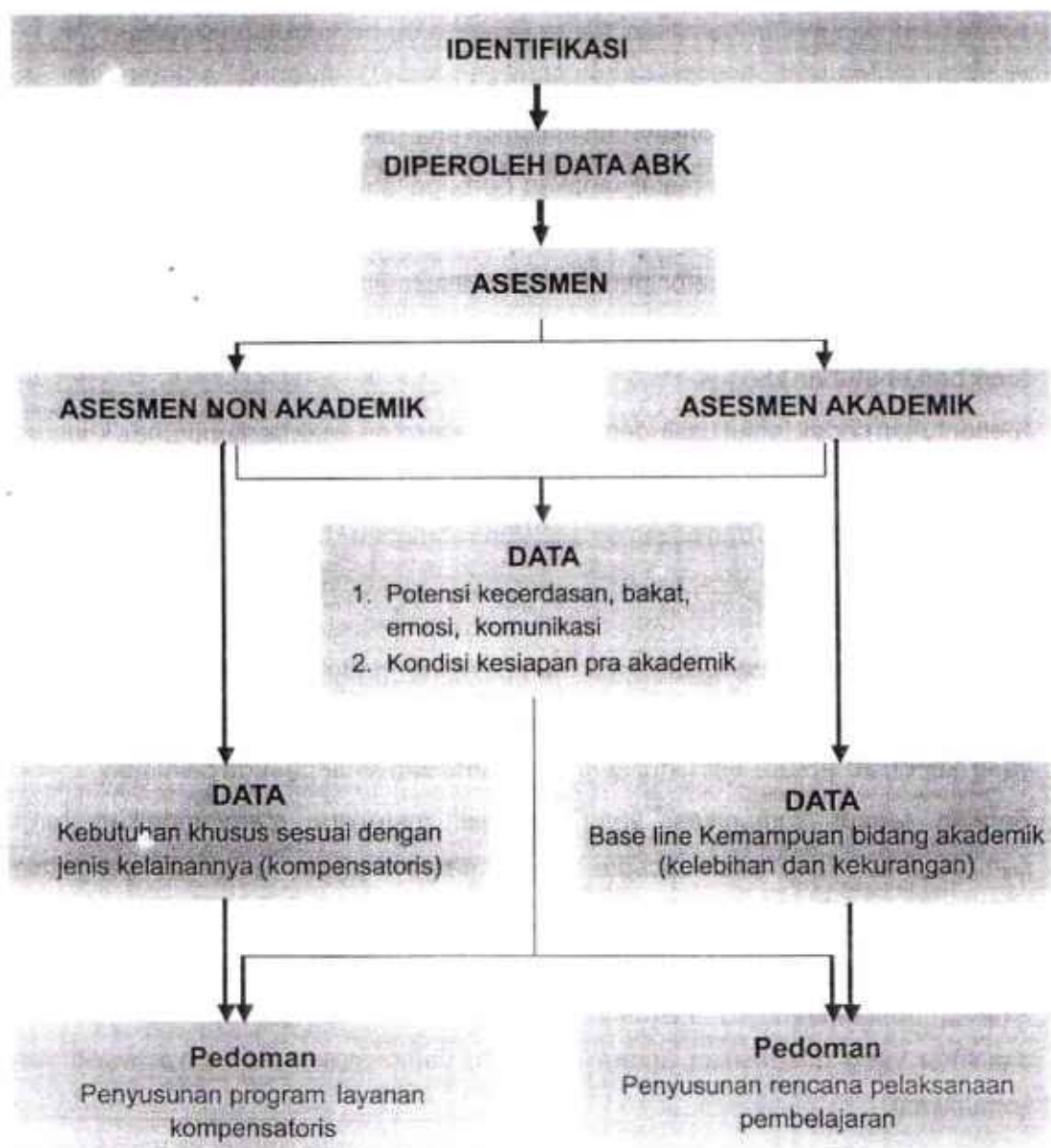


*Rahasia dalam pendidikan terletak pada menghargai siswa
(Ralph Waldo Emerson 1803-1882).*



A. Deskripsi

Modul 3 Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus ini, berisi uraian tentang pengertian, tujuan, sasaran, strategi pelaksanaan, indikator, evaluasi, tindak lanjut identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus (ABK). Disain pengembangan materi disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 3.1 Disain Relasi Identifikasi dan Asesmen dalam Pendidikan
(Budiyanto, 2009)



B. Tujuan

Secara umum tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul ini, adalah agar para peserta pelatihan memahami dan mampu melakukan identifikasi dan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus, serta mampu mengajarkannya kepada para peserta pelatihan lainnya.

Secara khusus tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul ini, adalah agar para peserta menguasai kemampuan-kemampuan berikut.

1. Memahami pengertian identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus
2. Memahami tujuan identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus.
3. Menentukan sasaran identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus.
4. Menjelaskan dan mampu melaksanakan berbagai strategi pelaksanaan identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus.
5. Menuliskan indikator-indikator identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus.
6. Menjelaskan dan melakukan teknik pelaksanaan evaluasi identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus.
7. Menentukan tindak lanjut hasil identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus.
8. Menyusun instrumen identifikasi dan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus.
9. Melakukan identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus.

C. Strategi Pelatihan

Strategi pelatihan yang diterapkan untuk mempelajari modul 3 ini, sebagai berikut.

1. Pelatihan diawali dengan ice breaking (penyegaran) untuk membangun komunikasi yang kondusif antara instruktur dengan peserta dan antar peserta pelatihan
2. Setelah terjadi komunikasi yang kondusif instruktur menyampaikan target pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.
3. Setelah diperoleh keyakinan bahwa semua peserta memahami target pelatihan serta strategi pencapaiannya, instruktur menguraikan materi pokok identifikasi dan asesmen yang difariasikan antara ceramah, demonstrasi dan tanya jawab yang komunikatif.
4. Untuk mempertajam pemahaman dan keterampilan peserta pelatihan, mereka diberi kesempatan melaksanakan diskusi dalam bentuk kelompok kecil, membahas tentang konsep dasar, prinsip-prinsip, tujuan, materi dan strategi identifikasi dan asesmen. Masih dalam formasi kelompok, peserta melaksanakan workshop penyusunan program kegiatan identifikasi dan asesmen serta membuat instrument akademik non standar Melakukan identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus.



5. Semua hasil diskusi kelompok dan workshop, dipresentasikan dan disimulasikan dihadapan kelompok lain secara klasikal untuk mempertajam rasa percaya diri, serta agar memperoleh masukan dari kelompok lain maupun instruktur.
6. Setelah semua kelompok mempresentasikan dan men'simulasikan hasil kerja kelompok, instruktur memberikan rangkuman penguatan, agar terhindar dari kekeliruan yang fatal serta untuk mempertebal keyakinan dan percaya diri pada semua peserta pelatihan.
7. Kegiatan pelatihan diakhiri dengan memberikan evaluasi dan refleksi untuk mengetahui tujuan dan target pelatihan sudah tercapai atau belum, pada sisi lain kegiatan ini juga dimaksud untuk memberikan umpan balik pada semua peserta agar dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan diri sebagai dasar peningkatan kompetensi diri lebih lanjut secara mandiri.

Langkah-langkah pelatihan tersebut diskemakan sebagai berikut.



Gambar 3.2 Strategi Pelatihan

D. Materi

Identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus harus dilakukan oleh seorang guru/pendidik, agar guru memahami anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dalam upayanya mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam praktiknya kedua kegiatan tersebut juga merupakan tahapan rangkaian kegiatan yang saling mendukung, dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hal ini, sesuai dengan pendapat McLoughlin dan Lewis (1981) yang menyatakan bahwa identifikasi



merupakan kegiatan awal yang mendahului asesmen. Jadi kegiatan asesmen baru dapat dilakukan setelah adanya identifikasi. Dengan demikian, identifikasi dan asesmen merupakan tahapan atau rangkaian kegiatan dari suatu proses pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Dalam bahasa sehari-hari, identifikasi sering disebut sebagai kegiatan penjaringan. Adapun asesmen disebut penyaringan (Direktorat PSLB, 2007). Kegiatan penjaringan biasanya belum tentu dilanjutkan ke kegiatan penyaringan. Sedangkan, kegiatan penyaringan dilakukan karena adanya kegiatan penjaringan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan identifikasi dapat dilakukan oleh guru dan pihak lain yang dekat dengan anak, seperti orang tua dan keluarganya, sedangkan asesmen biasanya perlu melibatkan tenaga profesional yang ahli dalam bidangnya, seperti ortopedagog, psikolog, sosiolog, terapis, dsb. Lebih jauh, untuk memahami kedua kegiatan ini perlu dijelaskan secara terpisah agar tidak terjadi kesalahpahaman atau paham yang salah tentang kedua istilah tersebut, sehingga mengakibatkan kerancuan dalam pelaksanaannya.

1. Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

a. Pengertian

Identifikasi dapat diartikan menemukani. Dalam buku Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2007) identifikasi ABK dimaksudkan sebagai usaha seseorang (orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya) untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan/ penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis) dalam pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya (anak-anak normal).

Jadi identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah suatu upaya menemukani anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini anak berkebutuhan khusus dengan berbagai gejala-gejala yang menyertainya. Identifikasi anak berkebutuhan khusus, khususnya anak berkebutuhan khusus tidak hanya sebagai suatu kegiatan dalam upaya untuk menemukan anak yang diduga anak berkebutuhan khusus, tetapi juga sekaligus untuk mengenali gejala-gejala perilaku yang menyimpang dari kebiasaan perilaku pada umumnya. Identifikasi anak berkebutuhan khusus ini perlu dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi penafsiran yang salah tentang kondisi objektif perilaku anak sehingga dapat menentukan tindak lanjut yang tepat.

Identifikasi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan berdasarkan gejala-gejala yang dapat diamati, seperti (1) gejala fisik, (2) gejala perilaku, dan (3) gejala hasil belajar. Gejala fisik yang dapat diamati dan dijadikan sebagai acuan dalam proses



pengidentifikasian, misalnya adanya gangguan penglihatan, pendengaran, wicara, kekurangan gizi, pengaruh obat-obatan dan minuman keras, atau semuanya yang menyangkut terganggunya fungsi fisik. Gejala perilaku misalnya, emosi yang labil, perilaku sosial yang negative seperti suka membolos, suka merusak, berkelahi, berbohong, malas atau semua perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan gejala hasil belajar dapat diamati melalui prestasi belajar yang rendah yang mengakibatkan tidak naik kelas bahkan dikeluarkan dari sekolah alias *dropt out* (DO), atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis. Apabila gejala-gejala tersebut di atas ditemukan pada anak, maka patut ditandai dan dicurigai sebagai anak berkebutuhan khusus. Proses semacam inilah yang disebut sebagai kegiatan identifikasi (Riana Bagaskorowati, 2007).

b. Tujuan

Secara umum tujuan utama identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah menemukan adanya gejala kelainan dan kesulitan, kemudian temuannya dijadikan dasar untuk mengambil langkah selanjutnya. Langkah tersebut, biasanya berupa asesmen yang lebih akurat (IGAK Wardani (1996)). Agar hasil identifikasi dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan objektif, maka identifikasi hendaknya dilakukan oleh orang terdekat dengan anak, seperti orang tua, sanak saudara atau gurunya yang selalu berhubungan dengan anak. Bahkan dalam pendidikan anak berkelainan, identifikasi dapat pula dilakukan oleh berbagai pihak yang berhubungan dengan pelayanan anak, yaitu ortopedagog, dokter, psikolog, atau petugas sosial sesuai dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

Identifikasi yang bertujuan untuk menandai gejala-gejala berkaitan dengan kelainan atau penyimpangan perilaku yang mengakibatkan kesulitan atau hambatan dalam belajar di sekolah dapat dilakukan oleh guru dan orang tua. Salah satu cara yang dapat membantu guru dan orang tua mengenal gejala-gejala perilaku tersebut adalah dengan membuat daftar cek yang dapat dipergunakan untuk mengecek perilaku anak dalam belajar. Untuk membuat daftar cek, guru perlu terlebih dahulu membuat daftar aspek perilaku yang akan diamati sesuai dengan perilaku yang diduga menyimpang. Kemudian memperkirakan jenis perilaku anak yang menunjukkan penyimpangan (contoh daftar cek identifikasi pada hal lampiran). Daftar cek tersebut dapat disusun dalam bentuk matriks sesuai dengan kebutuhan untuk merekamnya. Oleh karena identifikasi ini dilakukan secara individual, maka daftar cek tersebut harus pula memuat identitas anak yang diidentifikasi.



Lerner (1998) menyatakan bahwa tujuan identifikasi dilakukan untuk lima keperluan, diuraikan sebagai berikut.

- 1) *Penjaringan (Screening)*, yaitu suatu kegiatan identifikasi yang berfungsi untuk menandai dan menetapkan anak-anak yang memiliki kondisi kelainan secara fisik, mental intelektual, sosial dan/atau emosi serta menunjukan gejala-gejala perilaku yang menyimpang dari perilaku anak pada umumnya. Misalnya, anak dengan gangguan penglihatan secara nyata dapat dilihat dari kerusakan fungsi penglihatannya, anak dengan gangguan pendengaran dapat diamati melalui tes pendengaran atau cara mereka berkomunikasi, dan sebagainya.
- 2) *Pengalihanganan (referral)*, yaitu kegiatan identifikasi yang dilakukan untuk tujuan pengalihanganan (referral) ke tenaga profesi lainnya yang lebih berkompeten di bidangnya, seperti dokter, terapis, psikolog, konselor, perawat, dan profesi lainnya apabila terdapat gejala-gejala yang memerlukan pengamatan lebih lanjut secara teliti dan cermat. Dengan demikian, diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan tindakan berikutnya sesuai dengan kondisinya.
- 3) *Klasifikasi (classification)*, yaitu kegiatan identifikasi yang dilakukan untuk tujuan menentukan atau menetapkan apakah anak tersebut tergolong anak kebutuhan khusus yang memang memiliki kelainan kondisi fisik, mental intelektual, sosial dan/atau emosional serta gejala-gejala perilaku yang menyimpang dari perilaku anak pada umumnya sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus dalam pendidikannya.
- 4) *Perencanaan pembelajaran (instructional planning)*, yaitu kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pengajaran individual. Dasarnya adalah hasil dari klasifikasi. Setiap jenis dan tingkat kelainan yang dialami anak berkebutuhan khusus memerlukan program pembelajaran yang berbeda satu sama lain.
- 5) *Pemantauan kemajuan belajar (monitoring pupil progress)*, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan itu berhasil atau tidak dalam meningkatkan kemampuan anak. Apabila berhasil, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan lebih baik lagi programnya. Sebaliknya apabila tidak berhasil, maka program pembelajarannya perlu ditinjau ulang dan diperbaiki beberapa aspek yang berkaitan dengan tujuan, materi, metode, media dan evaluasinya.



c. Sasaran Identifikasi

Setiap anak dapat dipastikan mengalami kesulitan dan hambatan belajar, namun pada tingkat hambatan dan kesulitan tertentu belum tentu anak memerlukan layanan pendidikan secara khusus. Mereka masih dapat ditangani melalui program pendidikan pada umumnya sehingga dapat mengikutinya tanpa hambatan dan kesulitan yang berarti. Namun apabila anak tersebut memiliki tingkat kesulitan dan hambatan belajar yang mengakibatkan perlunya layanan pendidikan secara khusus, maka mereka tergolong anak berkebutuhan khusus. Secara umum anak berkebutuhan khusus dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebabnya, yakni faktor dari dalam diri anak itu sendiri dan/atau faktor dari luar diri anak atau lingkungan. Faktor penyebab dari dalam diri anak (internal) dapat berbentuk kelainan dan/atau penyimpangan pertumbuhan dan/atau perkembangan pada segi fisik, mental intelektual, sosial, emosi dan/atau psikologis dasarnya yang mengakibatkan kesulitan dan hambatan belajar yang relatif menetap (permanen). Sementara itu faktor penyebab dari luar diri anak atau lingkungan (eksternal) dapat berupa rendahnya tingkat ekonomi, terjadinya konflik politik, bencana alam, sistem pendidikan, korban narkoba, dan lain-lain yang mengakibatkan anak mengalami kesulitan dan hambatan belajar sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan secara khusus. Namun kesulitan dan hambatan belajar yang dialami anak ini sifatnya sementara (temporer) apabila ditangani secara tepat.

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup anak berkebutuhan khusus, maka pada modul ini yang menjadi sasaran identifikasi difokuskan pada anak berkebutuhan khusus yang diakibatkan oleh faktor internal individu itu sendiri, yakni anak yang mengalami kelainan pada segi fisik, mental intelektual, sosial, emosi dan/atau psikologis dasarnya sehingga memerlukan layanan pendidikan secara khusus. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus yang menjadi sasaran identifikasi, adalah:

- 1) Anak yang memiliki gejala problem belajar spesifik, meliputi (1) anak dengan problem belajar menulis (disgrafia), (2) anak dengan problem belajar membaca (disleksia), dan (3) anak dengan problem belajar berhitung (diskalkulia).
- 2) Anak yang memiliki gejala "*under achiever*".
- 3) Anak yang lamban belajar.
- 4) Anak yang memiliki gejala gangguan emosi dan perilaku.
- 5) Anak yang memiliki gejala gangguan komunikasi.
- 6) Anak yang memiliki gejala gangguan kesehatan dan gizi.



- 7) Anak yang memiliki gejala gangguan gerakan dan anggota tubuh.
- 8) Anak yang memiliki gejala gangguan penglihatan.
- 9) Anak yang memiliki gejala gangguan pendengaran.
- 10) Anak yang memiliki gejala autisme.
- 11) Anak dengan korban kekerasan dan narkoba. (Yusuf, 2005);

Ditinjau dari keberadaan anak, sasaran identifikasi diarahkan pada ABK yang sudah bersekolah di sekolah reguler, ABK yang baru masuk sekolah reguler, dan ABK yang belum/tidak masuk sekolah (Direktorat PSLB, 2007). Tetapi, tidak menutup kemungkinan sasaran identifikasi ditambah dengan anak berkelainan lainnya yang belum terungkap pada daftar tersebut yang dianggap dapat menimbulkan gangguan dan hambatan belajar, seperti anak dengan kecerdasan luar biasa yang memiliki intelegensi di atas rerata, atau sebaliknya anak dengan kecerdasan jauh di bawah rerata, seperti anak terbelakang mental (tunagrahita). Identifikasi anak dengan intelegensi di atas rata-rata dan di bawah rata-rata tentu saja memerlukan upaya kerja sama dengan tenaga profesi lain untuk mengukurnya, yakni psikolog yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menentukan tingkat intelegensi seorang anak berada di atas rata-rata, rata-rata, atau di bawah rata-rata. Untuk mengenal gejala-gejala perilaku yang menyertai masing-masing kelainan/gangguan tersebut dapat dilihat pada contoh instrumen (lampiran).

d. Strategi Pelaksanaan Identifikasi

Sesuai dengan sasaran identifikasi ABK, terutama bagi ABK yang belum bersekolah atau drop out, maka sekolah yang bersangkutan perlu bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, RT, RW setempat dan posyandu untuk melakukan pendataan dan identifikasi di masyarakat. Apabila identifikasi menemukan ABK atau anak berkelainan, maka proses berikutnya dapat dilakukan pembicaraan dengan orangtua, komite sekolah maupun perangkat desa setempat untuk mendapatkan tindak lanjutnya.

Secara umum pelaksanaan identifikasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

(1) Menghimpun Data Anak

Tugas petugas/guru pada tahap ini adalah menghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas (berdasarkan gejala yang nampak pada siswa) dengan menggunakan Alat Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus.



(2) Menganalisis Data dan Mengklasifikasikan Anak

Pada tahap ini tujuannya adalah untuk menemukan anak-anak yang tergolong Anak Berkebutuhan Khusus (yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus). Buatlah daftar nama anak yang diindikasikan berkelainan sesuai dengan ciri-ciri. Jika ada anak yang memenuhi syarat untuk disebut atau berindikasi kelainan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dimasukkan ke dalam daftar nama-nama anak yang berindikasi kelainan sesuai dengan format khusus yang disediakan seperti terlampir. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda berkelainan, tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar khusus tersebut.

(3) Menginformasikan Hasil Analisis dan Klasifikasi

Pada tahap ini, hasil analisis dan klasifikasi yang telah dibuat oleh guru dilaporkan kepada kepala sekolah, orang tua siswa, dan dewan komite sekolah untuk mendapatkan saran-saran pemecahan atau tindak lanjutnya.

(4) Menyelenggarakan Pembahasan Kasus (case conference)

Pada tahap ini, kegiatan dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah setelah data Anak Berkebutuhan Khusus terhimpun dari seluruh kelas. Kepala Sekolah dapat melibatkan: (1) Kepala Sekolah sendiri; (2) Dewan Guru; (3) orang tua/wali siswa; (4) tenaga profesional terkait, jika tersedia dan memungkinkan; (5) Guru Pembimbing/Pendidikan Khusus (Guru PLB) jika tersedia dan memungkinkan.

Materi pertemuan kasus adalah membicarakan temuan dari masing-masing guru mengenai hasil indentifikasi untuk mendapatkan tanggapan dan cara-cara pencegahan serta penanggulangannya.

(5) Menyusun Laporan Hasil Pembahasan Kasus

Pada tahap ini, tanggapan dan cara-cara pemecahan masalah dan penanggulangannya perlu dirumuskan dalam laporan hasil pertemuan kasus. Format hasil pertemuan kasus dapat menggunakan contoh seperti pada lampiran. (Direktorat PSLB, 2007)

e. Jenis dan karakteristik ABK

1) Anak dengan Gangguan Penglihatan (Tunanetra)

Kurang lihat (Low Vision) memiliki ciri-ciri (1) kurang melihat (kabur) tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter, (2) kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, (3) kerusakan nyata pada kedua bola mata, (4) sering meraba dan tersandung waktu berjalan, (5) bagian bola mata yang hitam



berwarna keruh/bersisik/kering, (6) mata bergoyang terus, (7) mengalami peradangan hebat pada kedua bola mata, dan (8) dalam menulis tidak dapat mengikuti garis lurus.

Tidak Melihat (Tunanetra) memiliki ciri-ciri (1) tidak dapat melihat jari-jari tangannya yang berada satu meter di depannya, (2) memiliki visus sentralis 6/60 atau lebih kecil dari itu, (3) tidak dapat membedakan cahaya, dan (4) tidak dapat menggunakan penglihatannya untuk kegiatan pendidikan dan sosial.

2) Anak dengan Gangguan Pendengaran (Tunarungu)

Gangguan Pendengaran Ringan (Hard of Hearing). Anak dengan gangguan pendengaran ringan memiliki ciri-ciri (1) sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, (2) banyak perhatian terhadap getaran, (3) tidak ada reaksi terhadap bunyi/suara di dekatnya, (4) terlambat dalam perkembangan bahasa, (5) sering mengabaikan isyarat dalam berkomunikasi, (6) kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara

Gangguan Pendengaran Berat. Anak dengan gangguan pendengaran berat memiliki ciri-ciri (1) tidak dapat menangkap rangsangan suara melalui indera pendengaran, dan (2) tidak dapat menangkap rangsang suara untuk keperluan pendidikan dan sosial

3) Anak Tunagrahita

Tunagrahita Ringan ciri-cirinya adalah (1) memiliki IQ antara 50-70 (standar WISC), (2) dua kali berturut-turut tidak naik kelas, (3) masih mampu membaca, menulis dan berhitung sederhana, (4) tidak dapat berberfikir secara abstrak, (5) kemampuan konsentrasinya rendah, (6) kurang perhatian terhadap lingkungan, dan (7) sulit menyesuaikan diri dengan situasi (interaksi sosial)

Tunagrahita Sedang ciri-cirinya adalah (1) memiliki IQ antara 25-50 (standar WISC), (2) tidak dapat berfikir secara abstrak, (3) hanya mampu membaca kalimat tunggal, (4) mengalami kesulitan dalam berhitung sekalipun sederhana, (5) perkembangan interaksi dan komunikasinya terlambat, (6) mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru (penyesuaian diri), dan (7) kurang mampu untuk mengurus diri sendiri.

Tunagrahita Berat ciri-cirinya adalah (1) memiliki IQ 25- ke bawah (dari WISC), (2) hanya mampu membaca satu kata, (3) sama sekali tidak dapat berfikir secara abstrak, (4) tidak dapat melakukan kontak social, (5) tidak mampu mengurus diri sendiri, dan (6) banyak bergantung pada bantuan orang lain



4) **Anak Tunadaksa/Kelainan Anggota Tubuh/Gerakkan**

Polio ciri-cirinya adalah (1) jari-jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, (2) terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasanya, (3) terdapat cacat pada alat gerak, (4) kesulitan dalam melakukan gerakan (tidak sempurna, tidak lentur dan tidak terkendali), dan (5) anggota gerak kaku, lemah, lumpuh dan layu.

5) **Anak Cerebral Palsy (CP)**

Cerebral Palsy Ringan memiliki ciri-ciri (1) gejala tremor, regit, atetoit, spastic intensitasnya rendah, (2) dapat berjalan tanpa menggunakan alat, (3) dapat berbicara tegas-jelas, (4) dapat menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Cerebral Palsy Sedang memiliki ciri-ciri (1) gejala tremor, regit, atetoit, spastic intensitasnya sedang, (2) membutuhkan treatment/latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri, (3) memerlukan alat-alat khusus seperti brace, crotches, (4) interaksi dan mobilitas social terganggu

Cerebral Palsy Berat ciri-cirinya adalah (1) menunjukkan gejala tremor, regit, atetoit, spastic intensitasnya berat, (2) membutuhkan penanganan khusus dalam bicara, berjalan dan menolong diri sendiri, dan (3) tidak mampu hidup di tengah-tengah orang lain tanpa bantuan yang lain secara terus-menerus.

6) **Tunalaras (Anak yang mengalami gangguan emosi dan Perilaku)** ciri-cirinya adalah (1) mudah terangsang emosinya/emosional/mudah marah, (2) menentang otoritas, (3) sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu, (4) sering bertindak melanggar norma sosial/norma susila/hukum dan agama, dan (5) suka mencuri, mengganggu lingkungan dan tidak suka rutinitas.

7) **Anak cerdas dan/atau Berbakat Istimewa** memiliki ciri-ciri (1) terampil membaca pada usia lebih muda, (2) membaca lebih cepat dan lebih banyak, (3) memiliki perbendaharaan kata yang luas, (4) mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, (5) mempunyai minat yang luas, juga terhadap masalah orang dewasa, (6) mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri, (7) menunjukkan kesalahan (orisinalitas) dalam ungkapan verbal, (8) memberi jawaban, jawaban yang baik, (9) dapat memberikan banyak gagasan, (10) luwes dalam berpikir, (11) terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan, (12) mempunyai pengamatan yang tajam, (13) dapat berkonsentrasi dalam jangka



waktu yang panjang terutama dalam tugas atau bidang yang diminati, (14) berpikir kritis juga terhadap diri sendiri, (15) senang mencoba hal-hal baru, (16) mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi dan sintesis yang tinggi, (17) senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan masalah-masalah, (18) cepat menangkap hubungan sebab akibat, (19) berperilaku terarah terhadap tujuan, (20) mempunyai daya imajinasi yang kuat, (21) mempunyai banyak kegemaran/hobi, (22) mempunyai daya ingat yang kuat, (23) tidak cepat puas dengan prestasinya, (24) peka (sensitif) serta menggunakan firasat (intuisi), dan (25) menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan

- 8) **Anak Lamban Belajar** memiliki ciri-ciri (1) daya tangkap terhadap pelajaran lambat, (2) sering lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, (3) rata-rata prestasi belajar selalu rendah, dan (4) pernah tidak naik kelas.
- 9) **Anak yang Mengalami Kesulitan Belajar Spesifik (Disleksia, Disgrafia, Diskalkulia).** (1) **Disleksia** adalah anak yang memiliki ciri-ciri (a) mengalami kesulitan membaca (b) perkembangan kemampuan membaca terlambat, (c) kemampuan memahami isi bacaan rendah, (d) kalau membaca sering banyak kesalahan, (2) **Disgrafia** adalah anak yang memiliki ciri-ciri (a) mengalami kesulitan menulis, (b) kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai, (c) sering salah menulis huruf b dengan p, p dengan q, v dengan u, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya, (d) hasil tulisannya jelek dan hampir tidak terbaca, (e) tulisannya banyak salah/terbalik/huruf hilang, (f) sulit menulis dengan lurus pada kertas bergaris, (3) **Diskalkulia** adalah anak yang memiliki ciri-ciri (a) mengalami kesulitan belajar berhitung, (b) sulit membedakan tanda-tanda: +, -, x, :, <, >, =, (c) sulit mengoperasikan hitungan/bilangan, (d) sering salah membilang dengan urut, (e) sering salah membedakan angka 9 dengan 6; 17 dengan 71, 2 dengan 5, 3 dengan 8 dan sebagainya, (e) sulit membedakan bangun geometri
- 10) **Anak Autis** memiliki ciri-ciri (1) kesulitan mengenal dan merespon dengan emosi dan isyarat sosial, (2) tidak bisa menunjukkan perbedaan ekspresi muka secara jelas, (3) kurang memiliki perasaan dan empati, (4) ekspresi emosi kaku, (5) sering menunjukkan perilaku dan meledak-ledak, (6) menunjukkan perilaku yang bersifat stereotip, (7) sulit untuk diajak berkomunikasi secara verbal, (8) cenderung menyendiri, dan (9) sering mengabaikan situasi disekelilingnya



- 11) **Anak Korban/Pengidap Psikotropika** cirri-cirinya adalah (1) muka kelihatan pucat, (2) murung, suka menyendiri, malu, (3) perhatian terhadap pelajaran berkurang, (4) tak mampu konsentrasi dalam waktu yang cukup lama, dan (5) dalam perawatan dirinya terkesan kacau.
- 12) **Anak dengan Gangguan Komunikasi dan Wicara** memiliki cirri-ciri (1) sulit memahami isi pembicaraan orang lain, (2) sulit mengemukakan ide dan gagasan secara tulis maupun lisan, (3) tidak lancar dalam berbicara atau mengemukakan ide, (4) ering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, (5) menunjukkan gejala gagap atau gugup dalam berbicara, (6) suaranya parau/payah/aneh, dan (7) organ bicaranya tidak normal, misalnya: bibir sumbing, lidah terlalu tebal.

Berikut ini disajikan contoh Instrumen Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus yang dapat digunakan oleh guru, orang tua atau orang yang dekat dengan anak.

CONTOH INSTRUMEN

Tabel 3.1 Instrumen Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Nama Sekolah :
Kelas :
Diisi tanggal :
Nama Petugas :
Guru Kelas :

Gejala yang Diamati	Nama siswa yang diamati (berdasarkan nomor urut)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 dst
1. Gangguan Penglihatan (Tunanetra)																
1. Gangguan Penglihatan (Low vision):																
a. Kurang melihat (Kabur) tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter																
b. Kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya																
c. Tidak dapat menulis mengikuti garis lurus																
d. Sering meraba dan tersandung waktu berjalan																
e. Bagian bola mata yang hitam bewarna keruh/ bersisik/kering																
f. Mata bergoyang terus																
g. Peradangan hebat pada kedua bola mata																
h. Kerusakan nyata pada kedua bola mata																
2. Tidak Melihat (blind)																
a. Tidak dapat membedakan cahaya																



2. Gangguan Pendengaran (Tunarungu)

1. Kurang Pendengaran (hard of hearing):

- a. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar
- b. Banyak perhatian terhadap getaran
- c. Tidak ada reaksi terhadap bunyi/suara di dekatnya
- d. Terlambat dalam perkembangan bahasa
- e. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi
- f. Kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara

2. Tuli (deaf)

- a. Tidak mampu mendengar

3. Tunagrahita

1. Kecerdasan

a. Ringan

- a. Memiliki IQ 50 - 70 (dari WISC)
- b. Dua kali berturut-turut tidak naik kelas
- c. Masih mampu membaca, menulis dan berhitung sederhana
- d. Tidak dapat berfikir secara abstrak

Perilaku Adaptif

- a. Kurang perhatian terhadap lingkungan
- b. Sulit menyesuaikan diri dengan situasi (interaksi sosial)

b. Sedang

- a. Memiliki IQ 25-50 (dari WISC)
- b. Tidak dapat berfikir secara abstrak
- c. Hanya mampu membaca kalimat tunggal
- d. Mengalami kesulitan dalam berhitung sekalipun sederhana

Perilaku Adaptif

- a. Perkembangan interaksi dan komunikasinya terlambat
- b. Mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru (penyesuaian diri)
- c. Kurang mampu untuk mengurus diri sendiri

[illegible]



6. Anak Berbakat/Memiliki Kemampuan dan Kecerdasan Luar Biasa



9. Anak Autis

Kesimpulan :

f. Tindak lanjut



2. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

a. Pengertian

Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapny mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut (Lerner (Mulyono, 2001)). Adapun asesmen pendidikan bagi ABK adalah proses pengumpulan informasi yang relevan dengan kepentingan pendidikan anak yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pembuatan keputusan pengajaran atau layanan khusus (McLoughlin & Lewis, 1981, 2008; Sunardi & Sunaryo, 2007).

Asesmen anak berkebutuhan khusus adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan dan kelemahan sebagai dasar penyusunan program pembelajaran, agar proses pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Dengan demikian diharapkan mereka mampu mengikuti pembelajarannya dengan baik tanpa hambatan dan kesulitan yang berarti, dan pada gilirannya mereka dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen menurut Marlina (2007), sebagai berikut.

- (1) Menilai anak kebutuhan khusus secara individual
- (2) Menggunakan berbagai prosedur.
- (3) Mengembangkan tes baru dan prosedur lain untuk mengasesmen kemampuan akademik, bahasa dan keterampilan lain.
- (4) Mengidentifikasi informasi lain yang relevan dengan pendidikan, sehingga tercapai tujuan instruksional dan pendidikan.
- (5) Menilai lingkungan anak melalui beberapa pertanyaan dan tugas.
- (6) Mengevaluasi secara berkelanjutan atau memonitor program.
- (7) Mengembangkan prosedur asesmen nondiskriminasi.
- (8) Menggunakan pendekatan tim dalam asesmen.
- (9) Mengembangkan peran guru pendidikan khusus dalam asesmen.
- (10) Menggunakan data asesmen untuk membuat keputusan legal dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak.

b. Tujuan

Secara umum Sunardi & Sunaryo (2007) menjelaskan tujuan utama asesmen adalah untuk: (1) Memperoleh data yang relevan, obyektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi anak saat ini; (2) Mengetahui profil anak secara utuh,



terutama permasalahan atau hambatan belajar yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan anak; (3) Menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya dan memonitor kemajuannya.

Secara operasional tujuan asesmen adalah untuk:

- 1) Menemukan kondisi kemampuan/potensi perkembangan ABK, sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Menemukan kondisi kemampuan/potensi akademik ABK, sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.
- 3) Menentukan kondisi kemampuan/potensi non akademik (kebutuhan khusus) ABK, sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan program layanan kompensatoris yang sesuai dengan kelainan dan kebutuhan khusus yang diperlukan ABK.

c. Sasaran asesmen

- 1) **Sasaran Asesmen Ditinjau dari Usia**, meliputi (1) bayi usia 0 s.d. 1 tahun, (2) balita usia 1 s.d. 3 tahun, (3) usia pra sekolah 3 s.d. 5 tahun, (4) usia sekolah 7 s.d. 20, tahun.
- 2) **Sasaran Asesmen ditinjau dari Status Pendidikan**, meliputi (1) anak-anak yang belum bersekolah, (2) siswa sekolah di SD, SMP, SMA, dst, (3) anak usia sekolah yang drop out.
- 3) **Sasaran Asesmen Ditinjau dari Tempat dan Waktu**, meliputi (1) rumah, (3) posyandu, (4) klinik, (5) play group/taman bermain/TK/Diniyah, dan sekolah

Secara umum sasaran asesmen adalah semua anak. Karena pada hakekatnya semua anak adalah individu unik yang memiliki potensi dan kompetensi yang tidak sama. Dalam konteks pendidikan, tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan potensi semua anak seoptimal mungkin, oleh sebab itu kurikulum yang dipergunakan dalam pendidikan dikembangkan berbasis kompetensi anak pula.

Secara khusus sasaran asesmen adalah semua anak yang dinyatakan berkebutuhan khusus berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan sebelumnya.



d. Strategi asesmen

Pelaksanaan asesmen dapat dilakukan melalui kegiatan: (1) Observasi, yakni suatu strategi pengukuran dengan cara melakukan pengamatan langsung pada perilaku khusus ABK, termasuk di dalamnya keterampilan sosial dan akademik, kebiasaan belajar, maupun keterampilan menolong diri sendiri; (2) Analisis sampel kerja, yakni jenis pengukuran informal dengan menggunakan sampel pekerjaan anak, misalnya hasil tes, karangan ilmiah, karya seni, respon lisan; (3) analisa tugas, yakni suatu proses pemisahan, pengurutan, dan penguraian suatu komponen penting dari sebuah tugas; (4) Inventory informal, yaitu proses pengumpulan informasi yang dilakukan untuk mengukur aspek-aspek non akademik, seperti kebiasaan, perilaku sosial, dll.; (5) daftar cek (check list), yakni suatu strategi yang digunakan untuk mengamati suatu daftar sifat dengan cepat; (6) Skala penilaian (Rating Scale), yakni suatu strategi asesmen yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang opini dan penilaian, bukan laporan perilaku yang dapat diamati; (7) Wawancara, yakni cara yang digunakan untuk menggali informasi melalui Tanya jawab dan/atau; (8) campuran dari dua alatu lebih teknik-teknik 1-7 tersebut.

Agar diperoleh hasil yang optimal, asesmen dapat menerapkan strategi berikut: (1) penentuan sasaran asesmen; (2) penetapan tujuan asesmen; (3) pemilihan jenis instrument asesmen yang akan dipergunakan; (4) pelaksanaan asesmen; (5) analisis data hasil asesmen; (6) case conference, untuk menetapkan indikasi kondisi krusial anak; (7) penyusunan profil anak, sebagai dasar perumusan kurikulum akademik dan program intervensi kompensatori anak.

e. Jenis-Jenis Asesmen

1) Asesmen perkembangan

Asesmen perkembangan merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang aspek-aspek perkembangan anak yang diduga secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi akademiknya. Asesmen perkembangan diperlukan untuk bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran anak.

Rasional asesmen perkembangan merujuk pada konsep bahwa pendidikan hendaknya diselaraskan dengan irama perkembangan anak itu sendiri, dengan asumsi bahwa pembelajaran akademik dapat lebih optimal apabila aspek perkembangan dirinya tumbuh secara optimal pula. Budiyanto (2007) menyebutnya sebagai kecakapan pra-akademik atau pre-requisite menuju pembelajaran akademik. Lebih lanjut ditegaskan bahwa program



pembelajaran akademik dapat berjalan dengan baik apabila anak telah memiliki kesiapan atau kematangan sesuai dengan irama perkembangannya.

a) Aspek-aspek asesmen perkembangan

Harwell (1982) menegaskan bahwa aspek-aspek perkembangan anak yang perlu diasesmen untuk berbagai keperluan, khususnya untuk pendidikan, meliputi: (1) gangguan motorik; (2) gangguan persepsi; (3) gangguan atensi/perhatian; (4) gangguan memori; (5) hambatan dalam orientasi ruang, arah/spatial; (6) hambatan bahasa; (7) hambatan pembentukan konsep; dan (8) mengalami masalah perilaku.

b) Tingkatan perkembangan belajar

Berdasarkan konsep perkembangan, tingkat perkembangan belajar anak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) tingkatan motorik (*doing level*); (2) tingkatan persepsi (*matching level*); dan (3) tingkatan konseptual (*categorization level*). Indikator dan perilaku tingkatan perkembangan belajar motorik nampak pada (Tabel 3.2). Adapun indikator dan perilaku tingkatan persepsi nampak pada (Tabel 3.3).

Tabel 3.2 Tingkatan Perkembangan Belajar Motorik (*Doing level*)

Indikator Asesmen	Uraian
Diferensiasi	Kemampuan memilih & menggunakan secara tersendiri bagian tubuh dan menggerakkan secara terkontrol
Keseimbangan	Kesadaran & kemampuan mempertahankan suatu hubungan kearah titik pusat dari gaya tarik bumi
Hubungan Keruangan	Kesadaran tubuh, lateralitas, arah
Ritme	Jarak & kombinasi dari berbagai interval
Mata-tangan	Kemampuan menggabungkan apa yang dilihat dengan gerakan motorik halus



Tabel 3.3 Perkembangan Belajar Tingkatan Persepsi (*Matching level*)

Indikator Asesmen	Uraian
Diskriminasi	Kemampuan membedakan suatu bentuk (persepsi) dari bentuk yang lain
Bentuk & Latar	Kemampuan membedakan (memusatkan perhatian) antara bentuk utama dari latarnya (mana stimulus inti dan mana stimulus latarnya)
Closure	Kemampuan menambahkan detail yang hilang dari suatu bentuk/benda
Ingatan	Kemampuan mengingat kembali apa yang diperoleh melalui indera
Sekuens	Kemampuan mengatur secara tepat sesuai dengan urutan, sesuatu yang pernah diamati melalui indera
Intergrasi	Penggunaan dari 2 saluran input atau lebih secara serentak dan kemampuan untuk menghubungkan keduanya

Tingkatan konseptual (*Categorization level*)

Tingkatan konseptual (*Categorization level*) adalah kemampuan yangbanya dapat dicapai apabila anak telah menguasai level perkembangan motorik dan persepsi. Tingkat perkembangan ini merupakan tingkatan perkembangan belajar tertinggi dalam perkembangan anak, ditandai dengan telah dikuasainya kemampuan mengkategorisasi dan mengklasifikasi pengalaman-pengalaman yang diperolehnya menjadi konsep utuh terhadap suatu fenomena, sehingga anak mampu menarik suatu kesimpulan baik deduksi maupun induksi dengan baik.

Penguasaan konseptual ini sangat penting dalam pembelajaran akademik, karena untuk dapat menguasai materi pembelajaran akademik anak harus memiliki kemampuan konseptual atau *categorization* ini terlebih dahulu. Begitu kuatnya peran kesiapan perkembangan ini dalam pendidikan, sehingga di beberapa negara maju memposisikan kurikulum perkembangan lebih dominan dari kurikulum akademik, terutama pada jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar (*pre-school and basic elementary school*).



c) Praktik Asesmen Perkembangan

Asesmen perkembangan dalam praktiknya mencakup kemampuan-kemampuan/keterampilan perkembangan anak meliputi aspek-aspek perkembangan (1) kemampuan kognitif, (2) ketrampilan motorik, (3) ketrampilan persepsi, (4) ketrampilan social, (5) konsep diri dan harga diri, (6) ketrampilan menolong diri sendiri, (7) kemampuan melakukan aktivitas hidup sehari-hari (ADL), (8) ketrampilan bahasa dan berkomunikasi

2) Asesmen akademik

Asesmen akademik (*academic assesment*), merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkenaan dengan kondisi actual kemampuan akademik anak. Dalam hal ini minimal mencakup aspek kemampuan akademik dasar, yaitu asesmen keterampilan membaca, asesmen keterampilan menulis, dan asesmen keterampilan berhitung.

Sebagai bahan kajian lebih lanjut, berikut disajikan beberapa contoh instrument akademik dasar.



LEMBAR PENGAMATAN KECAKAPAN MEMBACA

IDENTITAS ANAK

Nama Anak : _____

Kelas : _____

Tgl. Lahir : _____

L / P : _____

ASPEK YANG DIAMATI

1 2 3 4 5

KECAKAPAN MEMBACA TEKNIS

Menggunakan konteks dalam membaca	☐	☐	☐	☐	☐
Akurasi dan kelancaran dalam membaca	☐	☐	☐	☐	☐
Kecakapan penguasaan kosa kata pandang	☐	☐	☐	☐	☐
Kecakapan analisis fonik	☐	☐	☐	☐	☐
Kecakapan analisis struktural	☐	☐	☐	☐	☐
Mengenal huruf kecil dan huruf besar pada alfabet	☐	☐	☐	☐	☐
Pengucapan bunyi huruf	☐	☐	☐	☐	☐
Konsonan (b,d,h,k, ...)	☐	☐	☐	☐	☐
Vokal (a,i,u,e,o, ...)	☐	☐	☐	☐	☐
Konsonan ganda (kr,gr,tr, ...)	☐	☐	☐	☐	☐
Diftong (ai, au, oi, ...)	☐	☐	☐	☐	☐
Menghubungkan bunyi membentuk kata	☐	☐	☐	☐	☐
Vareasi bunyi	☐	☐	☐	☐	☐
Kata ulang	☐	☐	☐	☐	☐
Kata majemuk,	☐	☐	☐	☐	☐
Awalan dan akhiran	☐	☐	☐	☐	☐
Imbuhan	☐	☐	☐	☐	☐

KECAKAPAN MEMBACA PEMAHAMAN

Menemukan pokok pikiran utama dan spesifik wacana tertulis	☐	☐	☐	☐	☐
Mengingat urutan kejadian atau pendapat	☐	☐	☐	☐	☐
Memprediksi	☐	☐	☐	☐	☐
Mengikuti petunjuk tertulis	☐	☐	☐	☐	☐
Mencari hubungan sebab akibat	☐	☐	☐	☐	☐
Membuat kesimpulan berdasarkan wacana tertulis	☐	☐	☐	☐	☐
Mengetahui kejanggalan isi wacana	☐	☐	☐	☐	☐
Mengenal materi faktual atau fiktif	☐	☐	☐	☐	☐
Makna jadwal, tabel, diagram, peta	☐	☐	☐	☐	☐
Makna/arti dari kata dan suku kata	☐	☐	☐	☐	☐



ANALISIS KONSEP DASAR MATEMATIKA

IDENTITAS ANAK

Nama Anak : _____

Kelas : _____

Tgl. Lahir : _____

L / P : _____

ASPEK YANG DIAMATI

1 2 3 4 5

GANGGUAN HUBUNGAN KERUANGAN

Pemahaman konsep atas-bawah	☐	☐	☐	☐	☐
Pemahaman konsep puncak dasar	☐	☐	☐	☐	☐
Pemahaman konsep jauh dekat	☐	☐	☐	☐	☐
Pemahaman konsep tinggi rendah	☐	☐	☐	☐	☐
Pemahaman konsep depan belakang	☐	☐	☐	☐	☐
Pemahaman konsep awal akhir	☐	☐	☐	☐	☐

PENGUASAAN KONSEP DASAR

Konsep relasi antar nilai	☐	☐	☐	☐	☐
Konsep waktu	☐	☐	☐	☐	☐
Konsep kuantitas	☐	☐	☐	☐	☐
Konsep serbaneka	☐	☐	☐	☐	☐

ABNORMALITAS PERSEPSI VISUAL

Hubungan objek dengan kelompok /set	☐	☐	☐	☐	☐
Kemampuan melihat objek dalam kelompok	☐	☐	☐	☐	☐
Mengidentifikasi jumlah objek dalam kelompok	☐	☐	☐	☐	☐
Kemampuan menjumlah dua kelompok benda	☐	☐	☐	☐	☐
Membedakan bentuk geometri	☐	☐	☐	☐	☐

ASOSIASI VISUAL-MOTOR

Menghitung benda secara berurutan	☐	☐	☐	☐	☐
Menyebutkan bilangan secara berurutan	☐	☐	☐	☐	☐

PERSEVERASI

Kelekatan perhatian pada objek tertentu dalam waktu lama	☐	☐	☐	☐	☐
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



ANALISIS KONSEP DASAR MATEMATIKA

IDENTITAS ANAK

Nama Anak : _____

Kelas : _____

Tgl. Lahir : _____

L / P : _____

ASPEK YANG DIAMATI 1 2 3 4 5

MENGENAL dan MEMAHAMI SIMBOL

Mengenal simbol +	☐	☐	☐	☐	☐
Mengenal simbol -	☐	☐	☐	☐	☐
Mengenal simbol x	☐	☐	☐	☐	☐
Mengenal simbol :	☐	☐	☐	☐	☐
Mengenal simbol >	☐	☐	☐	☐	☐
Mengenal simbol <	☐	☐	☐	☐	☐
Mengenal simbol =	☐	☐	☐	☐	☐
Mengenal simbol _	☐	☐	☐	☐	☐
Mengenal simbol (	☐	☐	☐	☐	☐
Mengenal simbol)	☐	☐	☐	☐	☐
Menggunakan simbol +	☐	☐	☐	☐	☐
Menggunakan simbol -	☐	☐	☐	☐	☐
Menggunakan simbol x	☐	☐	☐	☐	☐
Menggunakan simbol :	☐	☐	☐	☐	☐
Menggunakan simbol >	☐	☐	☐	☐	☐
Menggunakan simbol <	☐	☐	☐	☐	☐
Menggunakan simbol =	☐	☐	☐	☐	☐
Menggunakan simbol _	☐	☐	☐	☐	☐
Menggunakan simbol (	☐	☐	☐	☐	☐
Menggunakan simbol)	☐	☐	☐	☐	☐



Contoh Pedoman Observasi Kebiasaan Menulis

Nama Siswa:

Kelas:

Sekolah:

Nama Guru:

No	Aspek yang diamati	Ya	Tidak
Penampilan			
1	Apakah anak memegang pensil dengan benar?		
2	Apakah posisi kertas/buku sudah benar?		
3	Apakah posisi duduk anak sudah benar termasuk jarak antara mata dengan kertas		
4	Apakah anak tampak tegang, frustrasi atau emosional pada waktu menulis		
5	Apakah anak menunjukkan sikap negative, bosan, atau terganggu pada waktu menulis		
Kinerja			
1	Apakah dapat menguasai dasar menulis secara benar, seperti membuat garis lurus, garis tegak, garis miring, garis lengkung,		
2	Apakah dapat menulis bentuk huruf dengan benar		
3	Apakah penulisan bentuk huruf besar dan kecil tepat dan konsisten		
4	Apakah dapat mengatur jarak suku kata secara konsisten		
5	Apakah dapat menulis dan menempatkan tanda baca secara konsisten		
Total Skor			

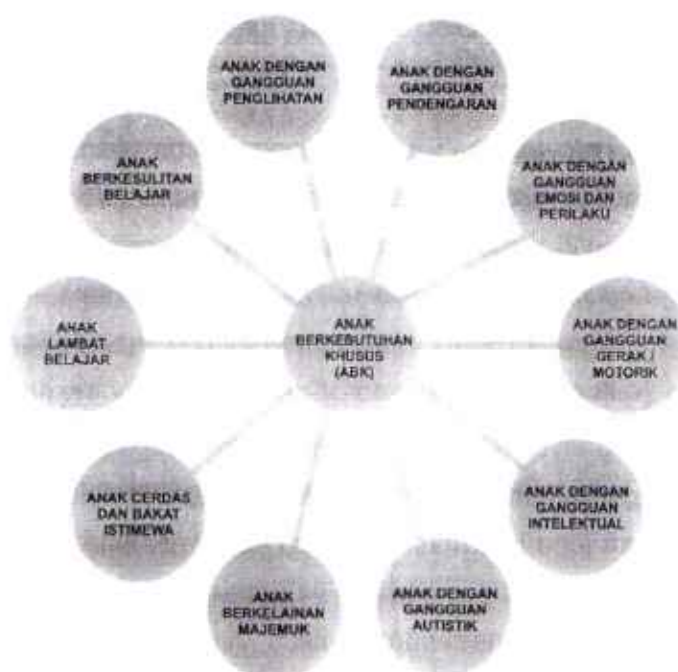
3) Asesmen Non Akademik (Kekhususan)

Asesmen kekhususan adalah proses pengumpulan informasi tentang kondisi anak berkebutuhan khusus yang meliputi kondisi kelainan, kemampuan yang telah dikuasai dan kesulitan/hambatan yang dialami untuk pertimbangan membuat keputusan tentang kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengurangi dampak kondisi kelainannya. Informasi tentang kondisi anak ini selanjutnya dipergunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan dalam penentuan program layanan kompensatoris bagi anak berkebutuhan khusus.

a) Tujuan

Tujuan asesmen non akademik (kekhususan) adalah (1) memperoleh informasi akurat tentang kondisi kelainan yang disandang anak berkebutuhan khusus, (2) memperoleh data akurat tentang indikator potensi anak berkebutuhan khusus yang dapat dioptimalkan sebagai kompensasi dari kelainan yang disandanginya, (3) memperoleh data akurat tentang indikator yang masih dapat dikembangkan untuk mengurangi beban kelainannya, (4) memperoleh data akurat tentang indikator kelainan yang masih dapat dikembangkan untuk mengurangi beban akibat kelainannya

Sasaran asesmen non akademik adalah anak-anak yang menunjukkan indikasi berkebutuhan khusus berdasarkan hasil identifikasi. Kelompok anak berkebutuhan khusus ini diantaranya tersaji pada gambar berikut:





Teknik pengumpulan informasi, strategi asesmen non akademik, pada dasarnya dapat mengacu pada asesmen perkembangan, dengan sedikit modifikasi sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sedangkan lingkup jenis hambatan/kelainan serta layanan kompensatoris yang diperlukan adalah sebagai berikut:

NO	HAMBATAN	JENIS KOMPENSATORIS
1	Tunanetra	☐ Orientasi dan mobilitas (OM). ☐ Braille.
2	Tunarungu	☐ Bina isyarat, ☐ Binawicara, ☐ Bina persepsi bunyi dan irama
3	Tunagrahita	☐ Bina diri (activity daily living)
4	Tunadaksa	☐ Bina diri dan bina gerak
5	Gangguan emosi/prilaku	☐ Bina pribadi (emosi dan social);
6	Autis dan ADD/ADHD	☐ Bina wicara, komunikasi, social/tingkah laku.
7	Kesulitan belajar	☐ Terapi edukatif
8	Cerdas/bakat istimewa	☐ Kurikulum berdiferensiasi. ☐ Bina sosial-pribadi

4) Asesmen Formal dan Informal

Asesmen formal adalah tes standar yang telah dibakukan. Pengertian standar dapat diartikan sebagai suatu tingkat tertentu untuk program tertentu. Misalnya tingkat asesmen perkembangan dan asesmen akademik, program Anak Usia dini, SD/SDLB, SMP dst. Asesmen formal/standar biasanya dilengkapi dengan sebuah manual yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan asesmen, penyekoran, dan penafsiran terhadap hasil tes. Manual juga memuat keterangan tentang proses standarisasi, seperti kegiatan uji coba, analisis hasil, revisi, dan juga informasi tingginya taraf kesahihan dan keterpercayaan tes. Beberapa Contoh jenis instrumen/alat asesmen formal bagi anak berkebutuhan khusus sebagai berikut.



Tabel 3.8 Contoh Beberapa Jenis Instrumen/Alat Asesmen Formal

Aspek yang akan diukur	Skala Pengukuran / tes yang dapat digunakan
Achievement (prestasi akademik)	Peabody Individual Achievement (PIA)
	Monroe Sherman
	Wide Range Achievement Test (WRAT)
	Woodcock-Johnson Psychoeducational Battery
	Woodcock Reading
Kemampuan Motorik Anak	The Purdue Perceptual Motor Survey (PPMS)
	Monroe Sherman Detroit Test of Learning Aptitude
	Harris Test of Lateral Dominance (Hand, Eye, Foot)
Kemampuan Visual	Visual Motor Integration
	Bender Gestalt
	Monroe Sherman Detroit Frosting (The Developmental Test of Visual Perception)
Kemampuan Auditors	Wepman Auditory Discrimination Test
	Illionis Test of Psycholinguistic Ability (ITPA)
Kemampuan Konsep Dasar	Boehm Test of Basic Concepts

Asesmen informal adalah asesmen yang dibuat oleh guru sesuai dengan konteks pembelajarannya di kelas. Asesmen informal dilaksanakan oleh guru setelah selesai pembelajaran. Biasanya guru menggunakan tes yang terdapat dalam buku ajar atau buku soal komersial yang didasarkan kurikulum. Untuk melaksanakan asesmen informal tersebut, guru dapat menggunakan Teknik Pengukuran Informal meliputi (1) observasi, (2) analisis sampel kerja, (3) analisis tugas, (4) infentory informal, (5) daftar cek (Check List), (6) skala penilaian (Rating Scale), (7) wawancara & kuesioner

f. Langkah-langkah Asesmen

Pelaksanaan asesmen yang baik perlu mempertimbangkan hal-hal berikut.

- 1) Gunakan Alat Identifikasi ABK!
- 2) Perhatikan gejala-gejala yang nampak!



- 3) Beberapa pernyataan anak amati saat mengerjakan tugas!
- 4) Tiap gejala yang ditemukan berilah nilai 1 yang tidak ditemukan dinilai 0!
- 5) Jumlahkan nilai yang diperoleh pada setiap jenis kelainan!
- 6) Bandingkan jumlah nilai dengan nilai standar!
- 7) Jika jumlah nilai sama atau lebih tinggi dari nilai standar, anak dapat dikategorikan berkelainan.
- 8) Perhatikan kemungkinan anak memiliki kelainan ganda

g. Pengembangan Instrumen Asesmen

Instrumen asesmen yang akan dikembangkan oleh guru atau profesional hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut.

- 1) Tentukan aspek yang akan diukur.
- 2) Rumuskan definisi konseptual dan operasional!
- 3) Sebutkan ciri-ciri atau indikator yang relevan yang akan diukur!
- 4) Susunlah daftar pertanyaan perilaku yang harus dikerjakan!
- 5) Pilih teknik pengumpulan informasi yang sesuai.

Tabel 3.9 Contoh Matrik Pengembangan Instrumen Asesmen

Aspek yang akan diukur	Definisi Konseptual & Operasional	Ciri-ciri / Indikator	ItemPertanyaan / perilaku yang harus dikerjakan	Teknik yang akan dipilih
Misal: Kecerdasan	Kemampuan seseorang dlm memecahkan masalah	1. Verbal 2. Numerikal 3. Geometri 4. Dll		Tes
...	...	...	...	...

h. Pengembangan Kriteria Skala Pengukuran

Kriteria skala pengukuran merupakan pedoman untuk menilai kemampuan-kemampuan yang diasesmen atau diukur untuk memudahkan pelaksanaan asesmen/penilaian. Skala pengukuran dikembangkan dengan menentukan kriteria tertentu misalnya dengan gradasi nilai (SK, K, C, B, SB) SK: Sangat Kurang, K: Kurang, C: Cukup, B: Baik, SB: Sangat Baik) Contoh skala penilaian sebagai berikut.



Tabel 3.10 Contoh Skala Penilaian Perilaku Anak

Aspek Perilaku yang akan diukur	SK	K	C	B	SB
PEMAHAMAN AUDITORIS 1. Kemampuan mengikuti perintah 2. Dst					
BAHASA ANJURAN 1. Kemampuan mengekspresikan pikiran 2. Dst					
ORIENTASI 1. Ketepatan waktu 2. Dst					
PERILAKU 1. Kemampuan Kerjasama 2. Dst					

Tabel 3.11 Contoh Inventory Gaya Belajar Siswa

Inventory Gaya Belajar Siswa

Nama Siswa:

Kelas:

No	Pertanyaan	Sering	Kadang	Jarang
1	Apakah Anda rapi & teratur			
2	Apakah Anda perencana & pengatur jangka panjang			
3				
4				
5				
6	Dst			
7				



Referensi

- Budiyanto. (2007): *Pedoman Penilaian Pembelajaran bagi Siswa Autis di Sekolah Inklusif*. Surabaya, Puslit Unesa.
- Direktorat PSLB. (2007). *Pedoman Khusus Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Direktorat PSLB.
- .(2007). *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat PSLB
- IGAK Wardani, (1995): *Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Dikti Depdikbud.
- Lerner. J.W. (1988): *Learning Disability: Theories, diagnosis and teaching strategies*. New Jersey: Houghton Mifflin Company.
- Marlina. (2007): *Asesmen dan Strategi Intervensi Anak Attention Deficit Hyperactivity Disorders*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
- McLoughlin, James A dan Lewis, Rena B. (1981): *Assesing Special Student, Strategies and procedures*. Charlese Merrill Publishing Company, Colombos, Toronto, London, Sydney.
- Mulyono Abdurahman. (2001): *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Jurusan PLB FIP UNJ.
- Munawir Yusuf & Edy Legowo. (2007): *Mengatasi Kebiasaan Buruk Anak Dalam Belajar Melalui Pendekatan Modifikasi Perilaku*. Jakarta: Dikti Depdiknas.
- Munawir Yusuf. (2005): *Pendidikan Bagi Anak Dengan Problema Belajar*. Jakarta: Dikti Depdiknas.
- .(2005): *Pendidikan bagi Anak Dengan Problema Belajar*. Jakarta: Dikti Depdiknas
- Riana Bagaskorowati. (2007): *Anaka Beresiko: Identifikasi, Asesmen, dan Intervensi Dini*. Jakarta: Dikti Depdiknas.
- Sunardi & Sunaryo. (2007): *Intervensi Dini Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.



ALAT IDENTIFIKASI/PENYARINGAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

PETUNJUK PENGISIAN

1. Gunakan Alat Indetifikasi Anak Berkebutuhan Khusus untuk anak yang dicurigai memiliki masalah dalam belajar
2. Beri tanda ceklis (V) pada kolom pernyataan sesuai dengan gejala yang muncul

Catatan :

1. Usahakan untuk melihat gejala-gejala yang tampak pada setiap anak dengan seksama, mungkin memerlukan waktu beberapa hari, jangan tergesa-gesa;
2. Agar gejala mudah dikenali, pada beberapa pernyataan, anak dapat terlebih dahulu diberi tugas tertentu baru kemudian diamati pada saat mereka mereka mengerjakan tugas tersebut;
3. Terdapat kemungkinan bahwa seorang anak mengalami lebih dari satu jenis kelainan (kelainan ganda)



Isian Form 1

INFORMASI PERKEMBANGAN ANAK (Diisi oleh Orang tua)

Petunjuk :

Isilah daftar berikut pada kolom yang tersedia sesuai dengan kondisi anak yang sebenarnya. Jika ada yang kurang jelas, konsultasikan kepada guru kelas tempat anak Bapak/Ibu bersekolah.

A. Identitas Anak :

1. Nama
2. Tempat dan tanggal lahir/umur
3. Jenis kelamin
4. Agama
5. Status anak
6. Anak ke dari jumlah saudara
7. Nama sekolah
8. Kelas
9. Alamat

B. Riwayat Kelahiran :

1. Perkembangan masa kehamilan
2. Penyakit pada masa kehamilan
3. Usia kandungan
4. Riwayat proses kelahiran
5. Tempat kelahiran
6. Penolong proses kelahiran
7. Gangguan pada saat bayi lahir
8. Berat bayi
9. Panjang bayi
10. Tanda-tanda kelainan pada bayi

C. Perkembangan Masa Balita :

1. Menyusu ibunya hingga umur
2. Minum susu kaleng hingga umur
3. Imunisasi (lengkap/tidak)
4. Pemeriksaan/penimbangan
Rutin berat badan/tdk



5. Kualitas makanan
6. Kuantitas makan
7. Kesulitan makan (ya/tidak)

D. Perkembangan Fisik :

1. Dapat berdiri pada umur
2. Dapat berjalan pada umur
3. Naik sepeda roda tiga pada umur
4. Naik sepeda roda dua pada umur
5. Bicara dengan kalimat lengkap
6. Kesulitan gerakan yang dialami
7. Status Gizi Balita (baik/kurang)
8. Riwayat kesehatan (baik/kurang)
9. Penggunaan tangan dominan

E. Perkembangan Bahasa :

1. Meraba/berceloteh pada umur
2. Mengucapkan satu suku kata yang bermakna kalimat (mis. Pa berarti bapak) pada umur
3. Berbicara dengan satu kata bermakna Pada umur
4. Berbicara dengan kalimat lengkap sederhana pada umur

F. Perkembangan Sosial :

1. Hubungan dengan saudara
2. Hubungan dengan teman
3. Hubungan dengan orangtua
4. Hobi
5. Minat khusus

G. Perkembangan Pendidikan :

1. Masuk TK umur
2. Lama Pendidikan di TK
3. Kesulitan selama di TK
4. Masuk SD umur



5. Kesulitan selama di SD :
6. Pernah tidak naik kelas :
7. Pelayanan khusus yang
pernah diterima anak :
8. Prestasi belajar yang dicapai :
9. Mata Pelajaran yang dirasa
paling sulit :
10. Mata Pelajaran yang dirasa
paling diserangi :
11. Keterangan lain yang
dianggap perlu :

Diisi Tanggal,

Orang tua,

(.....)



Isian Form 2

DATA ORANG TUA/WALI SISWA (Diisi orang tua/wali siswa)

1. Nama :
2. SD/MI :
3. Kelas :

A. Identitas Orang tua/wali

Ayah :

1. Nama Ayah :
2. Umur :
3. Agama :
4. Status ayah :
5. Pendidikan Tertinggi :
6. Pekerjaan Pokok :
7. Alamat tinggal :

Ibu :

1. Nama Ibu :
2. Umur :
3. Agama :
4. Status Ibu :
5. Pendidikan Tertinggi :
6. Pekerjaan Pokok :
7. Alamat tinggal :

Wali :

1. Nama :
2. Umur :
3. Agama :
4. Status perkawinan :
5. Pend. Tertinggi :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
8. Hubungan Keluarga :



B. Hubungan Orang tua anak

1. Kedua orang tua satu rumah :
2. Anak satu rumah dengan kedua orang tua :
3. Anak diasuh oleh salah satu orang tua :
4. Anak diasuh wali/saudara :

C. Sosial Ekonomi Orangtua

1. Jabatan formal ayah di kantor (jika ada) :
2. Jabatan formal ibu di kantor (jika ada) :
3. Jabatan informal ayah di luar kantor (jika ada) :
4. Jabatan informal ibu di luar kantor (jika ada) :
5. Rata-rata penghasilan (kedua orangtua) perbulan :

D. Tanggungan dan Tanggapan Keluarga

1. Jumlah anak :
2. Ysb. Anak yang ke :
3. Persepsi orang tua terhadap anak ysb. :
4. Kesulitan orang tua terhadap anak ysb. :
5. Harapan orang tua terhadap pendidikan anak ysb. :
6. Bantuan yang diharapkan orang tua untuk anak ysb. :

Diisi tanggal :

Orang tua/wali Murid

(.....)



Isian Form 3

DAFTAR ANAK YANG BERINDIKASI BERKELAINAN DAN MEMERLUKAN PELAYANAN KHUSUS

1. Nama :
2. SD/MI :
3. Kelas :

No.	Nama	L/P	Uraian/Kasus Masalah	Keterangan
1.	Amin	L	1. Kesulitan Belajar Matematika 2. Gangguan penglihatan 3. Sering tidak masuk karena sakit	Standar Nilai yang dicapai = 4 Standar Nilai yang dicapai = 5
2.	Roberta	P	1. Kesulitan hampir semua mata pelajaran (lamban belajar) 2. Keluarga miskin, penghasilan rata rata Perbulan Rp.300.000, dengan jumlah tanggungan keluarga 8 orang.	Standar Nilai yang dicapai = 4 Jumlah Sdr. Yang Sekolah = 5
3.	Dst.		Dst.	Dst.

Dibuat Tanggal :

Guru Kelas,

(.....)

MODUL IV
PEDOMAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM, SILABUS DAN RPP



Content

Pengertian Kurikulum

Komponen Kurikulum

Model Pengembangan Kurikulum

Model Duplikasi

Model Modifikasi

Model Substitusi

Model Omisi

Prinsip dalam Pengembangan Kurikulum

Penerapan Model Kurikulum

Kategori Kurikulum ABK dalam Setting Inklusif
Modifikasi

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Silabus



*Pengetahuan yang diperoleh di bawah paksaan tidak kuat terikat dalam pikiran.
(Plato 427-347 SM).*



A. Deskripsi

Modul 4 Pedoman Pengembangan Kurikulum, silabus, dan RPP ini berisi uraian tentang konsep kurikulum secara umum, komponen-komponen kurikulum, kurikulum dalam konteks inklusif, model-model kurikulum serta pengembangan kurikulum dalam konteks inklusif. Pada bagian berikutnya akan diuraikan tentang pengertian rencana pembelajaran dan strategi dalam pengembangan rencana pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Beberapa contoh silabus dan RPP juga akan disajikan pada bagian lampiran dari modul ini.

B. Tujuan

Tujuan yang ditargetkan setelah mempelajari modul ini adalah agar para peserta memiliki pemahaman tentang hakekat kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setting pembelajaran inklusif, serta memiliki kemampuan/keterampilan untuk memodifikasi kurikulum dan menyusun rencana pembelajaran dalam konteks pembelajaran inklusif.

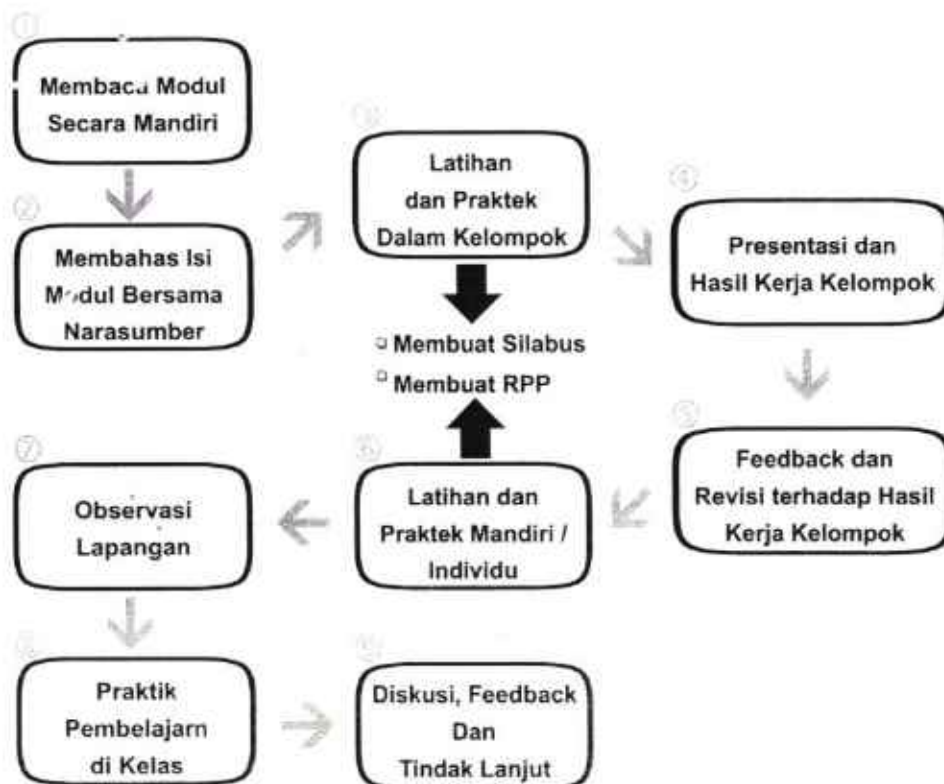
C. Strategi Pelatihan

Ada beberapa langkah kegiatan pokok yang harus dijalani oleh peserta bersama nara sumber dalam mempelajari modul agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa Langkah kegiatan tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Peserta membaca seluruh materi/bahan yang tersedia dalam modul.
2. Nara sumber bersama peserta melakukan pembahasan (ceramah, diskusi, Tanya jawab) tentang materi yang tersaji dalam modul ini.
3. Nara sumber bersama peserta melakukan *exercise* (latihan praktik) dalam mengembangkan kurikulum modifikasi untuk siswa berkebutuhan khusus dalam setting inklusif.
4. Peserta berlatih (praktik) menyusun rencana pembelajaran untuk pembelajaran siswa berkebutuhan khusus dalam setting inklusif.
5. Peserta melakukan observasi mengenai kurikulum, rencana pembelajaran dan praktik pembelajaran di sekolah inklusif.
6. Peserta melakukan praktik mengajar berdasarkan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya.
7. Peserta bersama nara sumber melakukan refleksi pengalaman pelatihan dan kemampuan yang telah dikuasai selama melakukan observasi dan praktik mengajar di sekolah.



Prosedur pelatihan yang harus dijalani oleh peserta untuk memahami modul bab ini, dapat digambarkan dalam bentuk skema, sebagai berikut



Gambar 4.1 Prosedur Pelatihan

D. Materi

1. Pengertian Kurikulum

Kurikulum dalam modul ini diartikan sebagai seperangkat rencana atau pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan atau pendidikan yang di dalamnya mencakup pengaturan tentang tujuan, isi (materi), proses dan evaluasi. Tujuan berarti apa yang akan dicapai, materi berarti apa yang akan dipelajari, proses berarti apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan evaluasi berarti apa yang harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan. Kurikulum bisa bersifat makro, artinya pengaturan tentang empat hal tersebut dalam skala nasional, tetapi juga bisa bersifat mikro yaitu pengaturan tentang empat hal tersebut dalam konteks pembelajaran di kelas.

2. Komponen Kurikulum

Berdasarkan pengertian kurikulum tersebut, secara umum terdapat empat komponen utama yang harus ada di dalam kurikulum yaitu (1) tujuan (2) isi/materi (3) proses dan (4) evaluasi.



a. Tujuan

Tujuan adalah seperangkat kemampuan atau kompetensi yang akan dicapai setelah para siswa menyelesaikan program pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan pendidikan atau pembelajaran secara umum terbagi ke dalam tiga jenis kemampuan, yaitu kemampuan (1) kognitif, (2) afektif, dan (3) psikomotorik. Kalau dilihat dari tingkatan atau ruang lingkupnya, maka tujuan pendidikan dapat dibedakan ke dalam 4 tingkatan, yaitu (1) tujuan pendidikan nasional, (2) tujuan pendidikan lembaga/institusi, (3) tujuan kurikuler, dan (4) tujuan instruksional. Tujuan pendidikan yang paling penting untuk dicermati dan dipahami oleh para guru adalah tujuan pendidikan pada level institusi (tujuan lembaga) dan tujuan pembelajaran pada level pengajaran (tujuan instruksional). Jika dikaitkan dengan kurikulum terkini yang berlaku di Indonesia saat ini (kurikulum 2006), maka yang dimaksud dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran kurang lebih sama dengan **standar kompetensi dan indikator**. Jadi ada empat jenis kompetensi (dalam kurikulum) yang harus dicermati oleh guru kaitannya dengan tujuan pembelajaran dalam setting inklusif yaitu:

- 1) Standar kompetensi lulusan (SKL)
- 2) Standar kompetensi (SK)
- 3) Kompetensi dasar (KD)
- 4) Indikator keberhasilan (indikator)

b. Isi (Materi)

Materi adalah isi atau konten yang harus dipelajari oleh siswa supaya bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran bisa berupa informasi, konsep, teori, dan lain-lain. Materi pembelajaran harus relevan atau mendukung terhadap pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi. Dalam kurikulum 2006 (KTSP), rumusan materi tidak lagi tersedia dalam kurikulum, tetapi harus dibuat atau dikembangkan sendiri oleh sekolah/guru. Materi biasanya dikembangkan oleh guru dengan mengacu kepada buku sumber yang relevan.

c. Proses

Proses adalah kegiatan atau aktivitas yang akan dijalani oleh siswa supaya bisa menguasai materi yang diajarkan dan bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Proses kurang lebih sama pengertiannya dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) atau pengalaman belajar, yakni serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa bersama guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Proses pembelajaran biasanya terkait dengan penggunaan metode



mengajar, pemakaian media pembelajaran, pengalokasian waktu, penggunaan sumber belajar, pengelolaan kelas dan lain-lain.

d. Evaluasi

Evaluasi adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan/ pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan/ketuntasan belajar siswa dalam mencapai atau menguasai kompetensi-kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Evaluasi juga ingin mengetahui apakah proses pembelajaran telah berjalan secara efektif atau optimal. Isu yang paling penting terkait dengan evaluasi adalah teknis atau cara yang akan digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran.

3. Model Pengembangan Kurikulum Inklusif

Setelah mempelajari empat komponen kurikulum yang telah dipaparkan tersebut, maka pertanyaan berikutnya adalah ***"Bagaimana model kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan inklusif di sekolah reguler?"***. Ada empat kemungkinan model pengembangan kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan di sekolah inklusif, yaitu (1) model duplikasi, (2) model modifikasi, (3) model substitusi, (4) model omisi.

a. Model Duplikasi

Duplikasi artinya meniru atau menggandakan. Meniru berarti membuat sesuatu menjadi sama atau serupa. Model kurikulum, duplikasi berarti mengembangkan dan atau memberlakukan kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus secara sama atau serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk siswa pada umumnya (reguler). Jadi, model duplikasi adalah cara dalam pengembangan kurikulum, bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus dengan menggunakan kurikulum yang sama seperti yang dipakai oleh anak-anak pada umumnya. Model duplikasi dapat diterapkan pada empat komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses dan evaluasi.

Duplikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang diberlakukan kepada anak-anak reguler juga diberlakukan kepada siswa berkebutuhan khusus. Dengan demikian, maka standar kompetensi lulusan (SKL) yang diberlakukan untuk siswa reguler juga diberlakukan untuk siswa berkebutuhan khusus. Demikian juga dengan standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD) dan juga indikator keberhasilan.



Duplikasi isi/materi berarti materi-materi pembelajaran yang diberlakukan kepada siswa reguler (umum) juga diberlakukan sama kepada siswa-siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus memperoleh informasi, materi, pokok bahasan atau sub-pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada siswa-siswa reguler.

Duplikasi proses berarti siswa berkebutuhan khusus menjalani kegiatan atau pengalaman belajar mengajar yang sama seperti yang diberlakukan kepada siswa-siswa reguler. Duplikasi proses bisa berarti kesamaan dalam metode mengajar, lingkungan/seting belajar, waktu belajar, media belajar, atau sumber belajar.

Duplikasi evaluasi, berarti siswa berkebutuhan khusus menjalani proses evaluasi atau penilaian yang sama sebagaimana yang diberlakukan kepada siswa-siswa reguler. Duplikasi evaluasi bisa berarti kesamaan dalam soal-soal ujian, kesamaan dalam waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi, atau kesamaan dalam tempat atau lingkungan ketika evaluasi dilaksanakan.

b. Model Modifikasi

Modifikasi berarti merubah untuk disesuaikan. Dalam kaitan dengan model kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus, maka model modifikasi berarti cara pengembangan kurikulum, dengan memodifikasi kurikulum umum yang diberlakukan untuk siswa-siswa reguler **dirubah untuk disesuaikan** dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Dengan demikian, siswa berkebutuhan khusus menjalani kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi dapat diberlakukan (terjadi) pada empat komponen utama pembelajaran yaitu tujuan, materi, proses dan evaluasi.

Modifikasi tujuan, berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus. Sebagai konsekuensi dari modifikasi tujuan, maka siswa berkebutuhan khusus akan memiliki rumusan kompetensi sendiri yang berbeda dengan siswa-siswa reguler, baik berkaitan dengan standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD) maupun indikator.

Modifikasi isi, berarti materi-materi pelajaran yang diberlakukan untuk siswa reguler dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus. Dengan demikian, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan sajian materi yang sesuai dengan kemampuannya. Modifikasi materi bisa berkaitan dengan keluasaan, kedalaman dan atau tingkat kesulitan. Artinya, siswa berkebutuhan